

DIKLAT PENJENJANGAN
AUDITOR PENGENDALI TEKNIS

EM

KODE MA : 2.270

EKONOMI MAKRO



2007

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN

EDISI KETIGA

Judul Modul : Ekonomi Makro

Penyusun : Drs. Sunarto
: DR. Bambang Setiono
Perevisi I : Drs. Nirwan Ristiyanto, M.M.
Perevisi II : Drs. Nirwan Ristiyanto, M.M.
Pereviu : Drs. Sura Peranginangin, M.B.A.
Editor : Yeni, S.E.

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Penjenjangan Auditor
Pengendali Teknis

Edisi Pertama : Tahun 1999
Edisi Kedua (Revisi Pertama) : Tahun 2002
Edisi Ketiga (Revisi Kedua) : Tahun 2007

ISBN 979-3873-18-3

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini, serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

KATA PENGANTAR

Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Ketetapan No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Hal tersebut merupakan tantangan berat bagi tugas pengawasan di masa depan yang harus dihadapi dengan komitmen dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Untuk mencapai tingkat profesionalisme aparat pengawasan, salah satu sarannya adalah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Tujuan diklat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, antara lain meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.

Tujuan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap/perilaku auditor pada tingkat kompetensi tertentu sesuai dengan perannya.

Guna mencapai tujuan di atas, sarana diklat berupa modul dan bahan ajar disajikan dengan sebaik mungkin dan memuat bahan terkini. Itulah sebabnya modul Ekonomi Makro ini telah mengalami revisi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.

Perlu kami tekankan bahwa modul ini bukanlah satu-satunya referensi yang berkenaan dengan substansi materinya. Peserta diklat diharapkan memperkaya pemahamannya melalui berbagai referensi lainnya yang terkait.

Untuk meningkatkan kualitas modul di masa mendatang, kami berterima kasih atas masukan maupun sumbang saran dari para pemakai modul.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga terwujudnya revisi modul ini.

Bogor, Desember 2007

 Kepala Pusdiklat Pengawasan BPKP 


Agus Witjaksono
NIP 060034042

DAFTAR ISI

		Halaman
	KATA PENGANTAR	iii
	DAFTAR ISI	iv
	DAFTAR GAMBAR	vi
	DAFTAR TABEL	vii
	DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1 Tujuan Pemelajaran	1
	2 Latar Belakang Perlunya Mempelajari Ekonomi Makro bagi Auditor	1
	3 Sistematika Penyajian	3
	4 Metode Pelatihan	5
BAB II	PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG ILMU EKONOMI	6
	1 Pengertian Ilmu Ekonomi	6
	2 Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro	7
	3 Sumber Daya dan Keterbatasannya	8
	4 Melakukan Pilihan	9
	5 Keterbatasan Anggaran Negara dan Pemrioritasan Program Latihan	11 14
BAB III	SISTEM PEREKONOMIAN	16
	1 Sistem Perekonomian	16
	2 Sistem Perekonomian Terpusat	17
	3 Sistem Perekonomian Pasar	18
	4 Perekonomian Pasar sebagai Sistem	20
	5 Sistem Perekonomian Campuran	24
	Latihan	26
BAB IV	P A S A R	27
	1 Pengertian Pasar	27
	2 Penawaran dan Permintaan	27
	3 Penawaran Agregat dan Permintaan Agregat	29
	4 Keseimbangan Pasar	32
	5 Peran Pemerintah dalam Keseimbangan Pasar	37
	Latihan	40
BAB V	PENDAPATAN NASIONAL	41
	1 Pengertian Pendapatan Nasional	41
	2 Pendapatan Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat	41
	3 Pendekatan Penghitungan Pendapatan Nasional	42
	4 Hierarki Penghitungan Pendapatan	43
	5 Metode Penghitungan Pendapatan Nasional di Indonesia	45

6	Kondisi Pendapatan Nasional Di Indonesia	46
7	Sekilas Tentang Inflasi	49
8	Kelemahan dalam Konsep Pendapatan Nasional	51
	Latihan	53
BAB VI	PERTUMBUHAN EKONOMI DAN ICOR	54
1	Pendahuluan	54
2	Rumus ICOR dan Penerapannya	59
3	Manfaat ICOR dalam Perencanaan Ekonomi Makro	61
4	Memahami ICOR	64
	Latihan	66
BAB VII	DISTRIBUSI PENDAPATAN	67
1	Pendahuluan	67
2	Pengukuran Pemerataan Distribusi Pendapatan	69
3	Kondisi Distribusi Pengeluaran (Belanja) Di Indonesia	73
4	Kemiskinan di Indonesia	76
5	Penyebab Terjadinya Ketimpangan	81
6	Penanggulangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan	82
	Latihan	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar-3.1:	SISTEM PEREKONOMIAN PASAR	21
Gambar-4.1:	KURVA PENAWARAN (<i>SUPPLY</i>)	28
Gambar-4.2:	KURVA PERMINTAAN (<i>DEMAND</i>)	29
Gambar-4.3:	KURVA PENAWARAN AGREGAT	30
Gambar-4.4:	KURVA PERMINTAAN AGREGAT	30
Gambar-4.5:	KURVA PENAWARAN AGREGAT NAIK	31
Gambar-4.6:	KURVA PERMINTAAN AGREGAT NAIK	32
Gambar-4.7:	KURVA KESEIMBANGAN PASAR	33
Gambar-4.8:	PERUBAHAN KESEIMBANGAN PASAR AKIBAT NAIKNYA PENAWARAN AGREGAT	34
Gambar-4.9:	PERUBAHAN KESEIMBANGAN PASAR AKIBAT TURUNNYA PENAWARAN AGREGAT	35
Gambar-4.10:	PERUBAHAN KESEIMBANGAN PASAR AKIBAT NAIKNYA PERMINTAAN AGREGAT	36
Gambar-4.11:	PERUBAHAN KESEIMBANGAN PASAR AKIBAT TURUNNYA PERMINTAAN AGREGAT	36
Gambar-7.1	Kurva Lorenz	70
Gambar-7.2	Kurva Lorenz: PERBEDAAN TINGKAT KETIDAKMERATAAN	71

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel-4.1	DAFTAR PENAWARAN AGREGAT DAN PERMINTAAN AGREGAT KOMODITAS BERAS DI JAKARTA	32
Tabel-5.1	PDB PENDEKATAN PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 MENURUT JENIS PENGELUARAN (MILYAR RUPIAH)	47
Tabel-5.2	PDB PENDEKATAN PRODUKSI ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA (MILYAR RUPIAH)	47
Tabel-5.3	PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (MILYAR RUPIAH)	48
Tabel-6.1	PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2003-2006	57
Tabel-6.2	PDRB MENURUT JENIS PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2005-2006 (RP MILYAR)	60
Tabel-6.3	PERUBAHAN PDRB MENURUT JENIS PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2005-2006 (RP MILYAR)	61
Tabel-6.4	PROYEKSI PDRB (TANPA PERENCANAAN ICOR) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2007 DAN 2008 (RP MILYAR)	62
Tabel-6.5	ICOR MENURUT LAPANGAN USAHA DI DKI JAKARTA TAHUN TAHUN 1996-1999	63
Tabel-6.6	ICOR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN NASIONAL MENURUT JENIS INDUSTRI TAHUN 1980-1990	64
Tabel-7.1	DISTRIBUSI PENGELUARAN PER KAPITA DAN INDEKS GINI, 2004-2006 DI INDONESIA	73
Tabel-7.2	INDEKS GINI AMERIKA SERIKAT DARI TAHUN KE TAHUN	74
Tabel-7.3	BATAS PENGELUARAN MINIMUM UNTUK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR	77
Tabel-7.4	PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA	78
Tabel-7.5	PERKEMBANGAN PROSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA	78

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran-1	PDB PENDEKATAN PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN	88
Lampiran-2	PDB PENDEKATAN PRODUKSI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN	89
Lampiran-3	PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL ATAS DASAR HARGA BERLAKU	90
Lampiran-4	JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA DAN KOMPOSISINYA	91

BAB I PENDAHULUAN

1. TUJUAN PEMELAJARAN

a. Tujuan Pemelajaran Umum

Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan mampu memahami ekonomi makro dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan.

b. Tujuan Pemelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan mampu mengidentifikasi aspek-aspek strategis dalam pelaksanaan pengawasan, mampu mengarahkan pengawasan pada aspek ekonomi yang strategis, dan mampu menggunakan instrumen ekonomi makro untuk kegiatan pengawasan.

2. LATAR BELAKANG PERLUNYA MEMPELAJARI EKONOMI MAKRO BAGI AUDITOR

Auditor, pada jenjang pengendali teknis telah berada pada posisi manajer. Dalam melaksanakan tugas audit, baik di lingkungan sendiri maupun di lingkungan auditan, pengendali teknis bermitra dengan para manajer pula. Oleh karena itu maka pengendali teknis sebagai auditor internal pemerintah perlu memiliki wawasan manajemen. Salah satu wawasan manajemen yang perlu dimilikinya adalah ekonomi makro. Ekonomi makro, saat ini telah menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP

Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) nasional.

RKP memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang didalamnya termasuk arah kebijakan fiskal, moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKP pemerintah pusat dan pemerintah daerah (RKPD) provinsi, kabupaten, dan kota harus memuat sasaran pembangunan secara jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dinyatakan dalam kerangka ekonomi makro. Penyusunan RKP dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan nasional) dengan mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), untuk menyelaraskan antar Renja-KL (Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga), antara kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Draf RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian setiap unsur pemerintah, baik sebagai unsur pelaksana maupun auditor selayaknya memahami ekonomi makro sebagai orientasi pembangunan.

Sampai saat ini, pembangunan di Indonesia masih jauh dari sasaran yang dituju, apalagi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Berdasar pemeringkatan PDB (pendapatan domestik bruto) atau GDP (*gross domestic product*) antarnegara di dunia oleh IMF (*International Monetary Fund*) diketahui PDB perkapita nominal Indonesia tahun 2006 sebesar US\$1,640 per tahun, menduduki urutan ke-115 dari 181 negara. Urutan teratas adalah Luxembourg dengan US\$ 87,955 dan terbawah adalah Burundi dengan US\$90. PDB sebesar US\$1,640 perkapita pada tahun 2006 tersebut setara dengan Rp15.080.000,00

atau Rp1.200.000,00 per bulan, jauh dari memadai untuk kehidupan sederhana. Jumlah itu pun baru angka per kapita, belum memperhatikan distribusinya yang masih sangat timpang antara si kaya dengan si miskin. Ketimpangan ini dapat dilihat dari hasil Survey Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) BPS tahun 1999, yang menunjukkan bahwa 61,1% produksi nasional dihasilkan oleh hanya 0,2% (66 ribu perusahaan) dari seluruh perusahaan nasional, sedangkan sisanya (98,8 %) atau sekitar 33,4 juta perusahaan hanya menguasai sekitar 38,9% produksi nasional. Lambatnya pencapaian target pembangunan, salah satunya disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Sekalipun mengalami penurunan dibandingkan dengan peringkat korupsi tahun 2005, namun pada tahun 2007 Indonesia masih menduduki peringkat dua di Asia.¹

Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah juga tidak terlepas dari masalah kekurangan sumber daya sebagai modalnya. Unsur 3E (ekonomis, efisien, dan efektif) penggunaan sumber daya harus menjadi dasar bagi setiap unsur pelaksana pembangunan. Auditor yang berkecimpung dalam penilaian unsur-unsur 3E harus memiliki bekal ekonomi makro yang bertolak pada keterbatasan sumber daya. Dengan mempelajari Ekonomi Makro, diharapkan para auditor lebih peduli terhadap perlunya percepatan pembangunan di Indonesia.

3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penulisan modul ini disusun dengan sistematika yang mudah untuk dipahami. Pada Bab I sebagai pendahuluan, dibahas hal-hal yang mendasari perlunya modul Ekonomi Makro. Dimulai dengan mengemukakan tujuan pembelajaran, latar belakang perlunya mempelajari ekonomi makro bagi auditor, sistematika penyajian, dan diakhiri dengan metode pelatihan.

¹ Kapanlagi.com, *Peringkat Korupsi Indonesia Se-Asia Turun*,
<http://www.kapanlagi.com/h/0000176955.html>.

Pada Bab II dibahas pengertian dan latar belakang ilmu ekonomi. Sebagai pendahuluan dikemukakan pengertian ilmu ekonomi, ekonomi mikro dan ekonomi makro, sumber daya dan keterbatasannya, perlunya melakukan pilihan, keterbatasan anggaran negara dan pemrioritasan program, dan diakhiri dengan latihan. Pada Bab III dibahas sistem perekonomian dengan materi sistem perekonomian terpusat, sistem perekonomian pasar, perekonomian pasar sebagai sistem, sistem perekonomian campuran, dan diakhiri dengan latihan.

Bab IV membahas pasar yang diawali dengan pengertian pasar, penawaran dan permintaan agregat, keseimbangan pasar, peran pemerintah dalam keseimbangan pasar, dan diakhiri dengan latihan. Pada bab V dibahas pendapatan nasional yang diawali dengan pengertian pendapatan nasional, pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat, pendekatan perhitungan pendapatan nasional, hierarki perhitungan pendapatan, metode penghitungannya, dan diakhiri dengan kelemahan dalam konsep pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi dan ICOR dibahas di Bab VI. Pada bagian pendahuluan dibahas pengertian pertumbuhan ekonomi, pengertian ICOR, pengertian investasi. Selanjutnya dibahas rumus ICOR dan penerapannya, manfaat ICOR dalam perencanaan ekonomi makro, memahami ICOR, dan latihan. Pada bab terakhir, yakni Bab VII, dibahas distribusi pendapatan yang diawali dengan pengertian distribusi pendapatan. Selanjutnya dibahas pengukuran pemerataan distribusi pendapatan, kondisi distribusi pendapatan di Indonesia dan beberapa negara tetangga, kemiskinan di Indonesia, penyebab terjadinya ketimpangan, penanggulangan ketimpangan distribusi pendapatan, dan diakhiri dengan latihan.

4. METODE PELATIHAN

Metode penyampaian materi pada diklat ini adalah pendekatan *andragogi*, yakni pendekatan belajar orang dewasa. Memperhatikan kondisi peserta yang telah berada pada posisi manajer, dengan sendirinya telah banyak pengalaman, baik di bidang pelaksanaan audit maupun pada kegiatan manajemen lainnya. Pada pelatihan ini peserta dipandang sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan banyak memberikan masukan, utamanya dalam menetapkan, mengimplementasikan, maupun mengevaluasi ekonomi makro. Dalam pelaksanaannya, pelatihan ini menerapkan metode ceramah, curah pendapat, dan diskusi.

BAB II PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG ILMU EKONOMI

Tujuan Pemelajaran

Setelah mempelajari bab ini para peserta diharapkan mampu memahami pengertian ilmu ekonomi, mengetahui persamaan dan perbedaan ekonomi mikro dan makro, sumber daya dan keterbatasannya, mampu melakukan pilihan, dan memahami keterbatasan anggaran negara

1. PENGERTIAN ILMU EKONOMI

Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas.² Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa penyebab utama perlunya mempelajari ilmu ekonomi adalah terbatasnya sumber daya yang ada, padahal kebutuhan kita untuk berbagai hal, tidak terbatas. Hal yang dipelajari dalam ilmu ekonomi adalah upaya-upaya manusia dalam mengatasi kesenjangan antara kedua hal yang saling bertentangan tersebut. Manusia harus pandai-pandai mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat memberikan kepuasan secara maksimal.

Dengan keterbatasan sumber daya, manusia harus melakukan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Pilihan yang diambil adalah pilihan yang memberikan keuntungan yang paling besar. Dengan keterbatasan sumber daya pula, kita harus mengorbankan kepentingan yang satu untuk dapat memenuhi kepentingan yang lain, karena terbatasnya uang yang dimiliki, sebagai contoh, orang tua harus rela mengorbankan keinginannya untuk berlibur ke luar kota

²Lipsey, Richard G. dan Steiner, Peter O., *Economics*, edisi ke-6 (New York: Harper International Edition, 1981), hal. 5.

agar dapat membeli seragam sekolah anaknya. Sehubungan dengan hal ini, ilmu ekonomi dapat pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai pilihan dan pengambilan keputusan atas pilihan-pilihan yang ada dalam kondisi yang terbatas.³

2. EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO

Menurut objek yang dipelajarinya, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Ekonomi Mikro dan (2) Ekonomi Makro. Apa persamaan dan perbedaan dari keduanya tersebut?

Persamaannya adalah, kedua-duanya mempelajari ekonomi sebagaimana telah didefinisikan di atas, yaitu bagaimana manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat banyak dan sangat bervariasi dengan sumber daya yang terbatas. Perbedaannya, Ilmu Ekonomi Mikro memfokuskan pembahasannya pada perilaku individual dari pelaku ekonomi, Ilmu Ekonomi Makro memfokuskan pembahasannya pada gejala-gejala perekonomian secara keseluruhan, secara totalitas, atau gejala umumnya. Contoh dari ekonomi mikro adalah perilaku individual dari suatu perusahaan dalam menetapkan berapa banyak barang yang akan dibeli, jika harga barang tersebut mengalami kenaikan atau penurunan, bagaimana meningkatkan jumlah produksinya, seberapa tinggi harga barang akan dijual agar perusahaan memperoleh laba maksimum, dan sebagainya. Dimaksud dengan individual di sini termasuk badan-badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Koperasi, Yayasan, dan sebagainya. Badan-badan hukum ini, sekalipun jumlah personil yang terlibat cukup banyak, namun seluruh unsur yang ada bertindak untuk kepentingan yang satu, yaitu merealisasikan tujuan badan hukum yang bersangkutan. Contoh dari ekonomi makro adalah membahas pertumbuhan

³ Walton M. Gary dan Frank C. Wykoff, *Understanding Economics Today*, edisi ke-3 (Boston: Richard D. Irwin, Inc., 1991), hal. 6.

ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Dalam membahas pertumbuhan ekonomi, yang dibahas adalah pertumbuhan kegiatan ekonomi pada umumnya, bukan pertumbuhan satu atau dua pelaku ekonomi tertentu. Begitu juga dalam membahas inflasi, yang dibahas adalah kecenderungan terjadinya kenaikan harga-harga barang/jasa pada umumnya, bukan kenaikan harga barang tertentu saja.

Sehubungan dengan hal itu, karena kita sedang membahas ekonomi makro, maka dalam modul ini hanya dibahas variabel-variabel yang berhubungan dengan gejala-gejala perekonomian secara keseluruhan, secara totalitas, atau gejala umum, bukan perilaku dari pelaku ekonomi secara individual. Namun perlu diketahui bahwa gejala umum dari perekonomian hanya dapat terjadi, jika sebagian besar dari pelaku ekonomi individual melakukan hal yang serupa, sehingga mampu mewarnai perekonomian secara keseluruhan. Contoh: "Tingkat pengangguran tahun ini meningkat karena banyak perusahaan melakukan pengurangan karyawan."

3. SUMBER DAYA DAN KETERBATASANNYA

Para ekonom, pada umumnya hanya membahas sumber daya yang produktif, yaitu sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan atau untuk memproduksi barang dan jasa. Empat jenis sumber daya produktif yang biasa dibahas, yaitu: (1) tenaga kerja, (2) tanah dan sumber daya alam lainnya, (3) barang modal, serta (4) pengusaha.⁴

Tenaga kerja, adalah pekerja yang bersedia menyerahkan tenaga, keterampilan, dan pengetahuannya untuk memproduksi barang/jasa. Tanah dan sumber daya alam lainnya meliputi tanah pertanian, kehutanan, perairan untuk perikanan dan transportasi, serta deposit pertambangan. Barang modal (*capital*) adalah barang-barang yang dipakai untuk memproduksi barang/jasa lain seperti

⁴Walton M. Gary dan Frank C. Wykoff, hal.13-14

mesin, peralatan, bangunan dan sebagainya. Pengusaha (*entrepreneurship*) adalah orang-orang yang mengorganisasikan sumber daya produktif lainnya untuk memproduksi barang/jasa.

Keberadaan sumber daya produktif di alam ini terbatas adanya sehingga untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Karena terbatasnya sumber daya ini, mengharuskan setiap pelaku ekonomi untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya secara efisien sehingga dapat memberikan kemakmuran setinggi-tingginya. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pilihan dari berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh. Pilihan yang diambil adalah yang memberikan keuntungan terbesar bagi pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen.

4. MELAKUKAN PILIHAN

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa karena terbatasnya sumber daya, maka untuk memaksimalkan kemakmuran perlu dilakukan pengambilan keputusan untuk menetapkan satu pilihan dari berbagai kemungkinan pilihan yang ada. Untuk memudahkan pemahaman, diberikan contoh perilaku dari pelaku ekonomi individual (kasus mikro) sederhana yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya pengambilan keputusan untuk melakukan sesuatu dimulai dari adanya permasalahan.

Tuan Bahola, seorang bujangan pegawai negeri golongan III/a dengan penghasilan sebesar Rp1,5 juta/bulan dan ia memerlukan alat transportasi dari rumah ke kantor. Selama beberapa tahun terakhir ini ia menabung, dan uang tabungannya telah mencapai sekitar Rp10 juta. Untuk mengatasi masalah transportasi ini Tn. Bahola secara sadar atau tidak, mulai mencoba mencari jalan keluarnya dengan mengembangkan berbagai kemungkinan awal, yaitu transportasi dapat diatasi dengan: naik bus kota seperti selama ini dijalaninya, naik kereta api seperti teman-teman sekantornya, membeli mobil, membeli

sepeda motor, naik sepeda biasa, jalan kaki saja dengan mencari rumah kontrakan di dekat kantor, dan sebagainya.

Dari berbagai kemungkinan tersebut, setelah dipertimbangkan keuntungan dan keburukannya, misalnya Tn. Bahola menetapkan akan membeli sepeda motor. Pertanyaan berikutnya muncul, yaitu motor merk apa? Untuk ini Tn. Bahola melakukan sedikit penelitian, diperoleh informasi keuntungan dan kerugian dari berbagai merk yang diketahuinya. Informasi yang mungkin dapat diperoleh sebagai berikut: (1) Merk A: Kecepatan tinggi, namun harga belinya relatif mahal dan biaya perawatan tinggi; (2) Merk B: Harga beli relatif murah namun pemakaian bahan bakarnya boros dan harga jual kembalinya (*resale value*) rendah; (3) Merk C: Harga belinya mahal, pemakaian bahan bakarnya hemat, biaya perawatan rendah, dan harga jual kembalinya cukup tinggi karena banyak diminati orang.

Dengan berbagai pertimbangan atas dasar informasi tersebut, misalnya Tn. Bahola memilih Merk C. Pertanyaan berikutnya akan muncul lagi, yaitu: (1) membeli sepeda motor baru dengan sedikit berhutang yang dapat diangsur selama 10 bulan, atau (2) membeli sepeda motor bekas sesuai dengan keuangan yang ada. Misalnya diputuskan memilih membeli sepeda motor bekas. Pertanyaan akan muncul lagi, yaitu: Ke mana motor akan dibeli? Untuk ini Tn. Bahola melihat-lihat iklan di koran dan memilih-milih motor merk C yang sesuai dengan kemampuan keuangannya. Setelah itu Tn. Bahola mendapatkan tiga buah motor yang menarik perhatiannya. Setelah dilakukan tawar-menawar, diputuskan motor merk C yang dijual oleh "Toko Motor Bekas Pakai" dengan harga Rp9.500.000,00. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa dengan sumber daya berupa uang Rp10.000.000,00, Tn. Bahola berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya, yaitu dalam mengatasi masalah transportasi.

5. KETERBATASAN ANGGARAN NEGARA DAN PEMRIORITASAN PROGRAM

Seperti halnya pada aktivitas ekonomi lainnya, anggaran negara yang berasal dari pemerintah pusat (APBN), maupun daerah (APBD) provinsi/kabupaten/kota juga terbatas. Keterbatasan anggaran negara ini dalam pengertian relatif, yakni jumlah anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan negara untuk mendanai pembangunan. Kebutuhan dana untuk melakukan pembangunan, yakni untuk membangun infrastruktur, sarana pendidikan, sarana keamanan, reklamasi tanah dan sumber daya alam yang selama ini telah rusak, dan sebagainya, apalagi untuk dapat mengentaskan seluruh masyarakat dari kemiskinan, diperlukan dana yang sangat banyak. Berita-berita belakangan ini tentang masih banyaknya penderita gizi buruk menunjukkan, bahwa dana APBN/APBD belum mampu menjangkaunya, sekalipun UUD 1945 mewajibkan pemerintah bertanggung jawab untuk mengentaskannya.

Ditinjau dari cakupannya, APBN/APBD hanya merupakan unsur dari ekonomi makro. Ekonomi makro membahas variabel-variabel ekonomi secara menyeluruh dalam suatu wilayah atau negara. Sebagai contoh, pada tahun 2006, untuk dapat merealisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%, diperlukan investasi sebesar Rp651.300.000.000.000,00, namun pemerintah hanya mampu menyediakan Rp89.900.000.000.000,00 atau 13,8%-nya. Sisanya, sebesar Rp561.400.000.000.000,00 diharapkan berasal dari masyarakat.⁵

Contoh lain, pada tahun 2006 di Indonesia terdapat pengangguran sebanyak 10,3 juta orang.⁶ Menurut Meneg PPN/Kepala Bappenas, berdasarkan pengalaman selama ini, setiap pertumbuhan ekonomi 1% hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 250.000 sampai 300.000 orang, atau

⁵ Bappenas, *Kerangka Ekonomi Makro Dan Pembiayaan Pembangunan* (2005), <http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=6/02%20%20Kerangka%20Ekonomi%20Makro1a.pdf>

⁶ BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2006*, No. Katalog BPS: 4103, h. 34.

rata-rata 275.000 orang.⁷ Atas dasar kondisi tersebut dan dengan asumsi tidak ada tambahan jumlah tenaga kerja baru, maka untuk mengentaskan seluruh pengangguran sebanyak 10,3 juta orang tersebut dalam waktu satu tahun, diperlukan pertumbuhan ekonomi (*g*_growth) sebesar:

$$g = \frac{10.300.000}{275.000} \times 1\% = 37,45\%$$

Pertumbuhan sebesar 37,45% mustahil untuk dapat direalisasikan. Asumsi tidak ada tambahan tenaga kerja juga tidak mungkin, karena laju pertumbuhan jumlah penduduk selama periode 2000-2006 rata-rata mencapai 1,34% per tahun. Dengan jumlah penduduk tahun 2006 sebanyak 222,19 juta orang, maka setiap tahun ada tambahan jumlah penduduk sebanyak 2,977,346 orang.⁸ Untuk menampung tambahan penduduk baru pun, setiap tahun perlu ada pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap tambahan tenaga yang ada, maka setiap tahun pula akan terjadi tambahan pengangguran sebagai *carry-over*. Selama ini, dengan segala kemampuan yang ada, termasuk penambahan utang pemerintah, pembangunan hanya mampu menghasilkan pertumbuhan sekitar 6%.

Dari uraian ini dapat diketahui bahwa anggaran negara ternyata juga sangat terbatas. Oleh karena itu maka dana yang ada harus benar-benar dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif (3E). Cara yang dapat dilakukan agar anggaran negara dikelola secara 3E, antara lain melalui pembuatan skala prioritas. Usulan kegiatan pada instansi pemerintah hendaknya dipilih hanya untuk kegiatan yang memiliki prioritas yang tinggi, ditinjau dari kepentingan masyarakat umum, bukan atas dasar kepentingan lainnya.

⁷ Meneg PPN/KepalaBappenas Paskah Suzetta, [Pertumbuhan Ekonomi 1% Dipatok Serap 400.000 Naker](http://plinplan.com/bisnis/keuangan/22601/2008/03/26/pertumbuhan-ekonomi-1-dipatok-serap-400000-naker/), <http://plinplan.com/bisnis/keuangan/22601/2008/03/26/pertumbuhan-ekonomi-1-dipatok-serap-400000-naker/>

⁸BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2006*, No. Katalog BPS: 4103, h. 4 .

Suatu kegiatan dikatakan memiliki prioritas tinggi atau tidak, dapat dilihat dari risiko berupa dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat jika kegiatan tersebut tidak dilakukan. Jika risikonya besar, maka kegiatan dapat dikatakan memiliki prioritas tinggi. Jika risikonya kecil, atau bahkan tidak ada risikonya, maka kegiatan tersebut skala prioritasnya rendah. Untuk keperluan ini sebaiknya dalam merencanakan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana APBN/APBD hendaknya dibuat suatu daftar skala prioritas. Tolok ukur prioritasnya adalah kemanfaatan dan atau risiko bagi masyarakat karena dana yang akan dipergunakan adalah milik masyarakat. Pejabat atau pelaksana kegiatan yang dibiayai dengan dana APBN/APBD adalah abdi negara, oleh karenanya harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

6. LATIHAN

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi.
- 2) Jelaskan apa persamaan dan perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro.
- 3) Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sumber daya ekonomi.
- 4) Jelaskan bahwa keberadaan sumber daya terbatas dan bagaimana cara yang harus dilakukan oleh pelaku ekonomi, agar sumber daya yang terbatas tersebut memberikan manfaat secara maksimal.
- 5) Jelaskan mengapa pelaku ekonomi harus mengembangkan dan melakukan pilihan sebelum mengambil suatu keputusan.
- 6) Jelaskan dan berikan argumentasi bahwa APBN/APBD juga terbatas dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola APBN/APBD tersebut.
- 7) Jika diketahui kondisi saat ini:
 - (1) Untuk dapat merealisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%, diperlukan investasi sebesar Rp651.300.000.000,00 dan pemerintah hanya mampu menyediakan 13,8%-nya. Sisanya diharapkan berasal dari masyarakat;
 - (2) Setiap pertumbuhan ekonomi 1% mampu menyerap tenaga kerja rata-rata sebanyak 275.000 orang;
 - (3) Jumlah penduduk saat ini sebanyak 222,19 juta, laju pertumbuhannya 1,34% per tahun.

Ditanya:

- a. Hitung berapa tambahan jumlah penduduk per tahun?
- b. Hitung berapa jumlah tenaga kerja yang dapat diserap tahun ini jika laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6%?

- c. Hitung berapa pertumbuhan ekonomi yang diperlukan agar tambahan jumlah tenaga kerja tahun ini (setara dengan bertambahnya jumlah penduduk) terserap dalam lapangan kerja?
- d. Hitung berapa investasi yang diperlukan untuk tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditanyakan pada butir c di atas, berapa yang dapat dipenuhi dari pemerintah dan berapa yang diharapkan dapat dipenuhi dari masyarakat?

BAB III

SISTEM PEREKONOMIAN

Tujuan Pemelajaran

Setelah mempelajari bab ini para peserta diharapkan memahami bentuk-bentuk sistem perekonomian dan memahami berbagai kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. SISTEM PEREKONOMIAN

Sistem perekonomian adalah sistem yang diterapkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi dan hasil-hasilnya, baik kepada individu maupun kepada lembaga pemerintah. Terdapat dua sistem perekonomian, yaitu sistem perekonomian terpusat (*centralized economic system*) dan sistem perekonomian pasar (*decentralized economic system*).⁹ Sistem Perekonomian Terpusat menekankan pada perencanaan dan pengendalian pemerintah, baik dalam hal faktor produksi maupun distribusi hasil-hasilnya. Pada sistem ini pemerintah mempunyai hak untuk mengatur. Perusahaan dan individu yang ada wajib mengikuti apa yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan Sistem Perekonomian Pasar menekankan pada kebebasan individual untuk menentukan pilihannya dalam mengalokasikan sumber daya, menentukan barang apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan menetapkan untuk siapa barang diproduksi.¹⁰

Namun perlu diketahui bahwa terdapat pula negara-negara yang tidak menganut pada kedua sistem perekonomian yang ekstrim seperti tersebut di atas. Kebanyakan sistem perekonomian di dunia berada di antara dua sistem

⁹ Walton M. Gary dan Frank C. Wykoff, hal. 14-15.

¹⁰ Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D., *Economics*, edisi ke-11 (New York: McGraw-Hill Book Company, 1985), hal. 41.

yang ekstrim tersebut, lebih dikenal sebagai sistem perekonomian campuran (*mixed economy*).

2. SISTEM PEREKONOMIAN TERPUSAT

Pada dasarnya perekonomian terpusat yang sering pula disebut sebagai perekonomian terencana (*planned economy*), menekankan pada nilai-nilai di mana pemerintah berperan sangat menentukan. Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu [komunisme](#) dan [sosialisme](#). Sebagai wujud pemikiran [Karl Marx](#), komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Tujuannya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi tersebut kepada para buruh.

Sistem perekonomian terpusat di [Uni Soviet](#) dan banyak negara [Eropa Timur](#) dimulai pada akhir dekade 1920-an, namun berakhir pada akhir abad ke-20. Saat ini hanya [Cuba](#), [Korea Utara](#), [Vietnam](#), dan [RRC](#) yang menggunakan sistem ini, sekalipun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. [China](#), misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan membolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di [abad ke-19](#). Komunisme yang anti kapitalisme menggunakan sistem [sosialisme](#) sebagai alat kekuasaan, di mana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsipnya adalah “semua milik rakyat, dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat secara merata”. Komunisme sangat membatasi [demokrasi](#) pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti [liberalisme](#).¹¹

¹¹ Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, *Sistem Perekonomian*, http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian

3. SISTEM PEREKONOMIAN PASAR

Pada dasarnya sistem perekonomian pasar menekankan pada peran individu pelaku ekonomi. Dalam sistem ini, para pelaku ekonomi diberi kewenangan untuk melakukan seluruh kegiatan bisnis sehingga sering pula disebut dengan sistem perusahaan swasta (*private enterprise system*), kapitalisme murni (*pure capitalism*), atau sistem pasar (*market system*).¹² Walton dan Wykoff mengatakan bahwa pada sistem ini terdapat desentralisasi secara ekstrim, di mana terdapat banyak pembeli dan penjual yang saling melakukan interaksi. Pada sistem ini, harga berperan sebagai acuan oleh para penjual dan pembeli dalam menetapkan nilai barang/jasa dan sumber daya sehingga sistem ini disebut juga sistem harga (*price system*).¹³

Ilmu ekonomi mengalami perkembangan pesat setelah Adam Smith menerbitkan buku yang berjudul: “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*” pada awal abad ke-18.¹⁴ Adam Smith menyatakan bahwa sistem perekonomian pasar didasarkan pada adanya pengakuan hak-hak kekayaan swasta dan adanya kebebasan untuk melakukan transaksi. Setiap individu akan melakukan apa yang terbaik dan menguntungkan untuk dirinya. Atas dasar pertimbangan ini, jika mereka diberi kesempatan secara penuh akan muncul kekuatan yang tak nampak (*invisible hand*) yang mendesak para individu, untuk bertindak secara efisien dan efektif guna memperoleh keuntungan.

Dengan perekonomian pasar yang di dalamnya terdapat sistem pertukaran barang/jasa, akan terbentuk harga yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan pemberi informasi. Pada gilirannya, harga mampu menjadi alat koordinasi atas

¹² Gordon, Sanford D. dan Dawson, George G., *Introductory Economics*, edisi ke-7 (Toronto: D.C. Heath and Company, 1991), hal. 9.

¹³ Walton M. Gary dan Frank C. Wykoff, hal. 33.

¹⁴ Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1981), hal. 12.

berbagai kegiatan individual untuk keuntungan masing-masing. Harga, pada dasarnya mencerminkan nilai atas barang/jasa yang sanggup diproduksi oleh perusahaan dan mampu dibayar oleh para pembeli. Dengan adanya harga, perusahaan dapat berkalkulasi apakah ia mampu mengoordinasikan faktor-faktor produksi, sehingga mampu memproduksi barang dengan memperoleh keuntungan. Jika perusahaan yakin bahwa dengan kalkulasinya akan diperoleh keuntungan, barang tersebut akan diproduksi. Sebaliknya jika diperkirakan tidak akan memperoleh keuntungan, akan memproduksi barang lain yang diperkirakan akan menguntungkan. Bagi pembeli, harga memberikan informasi apakah dengan uang yang dimilikinya akan diperoleh kepuasan. Sekiranya pada harga tersebut barang tidak akan memberikan keuntungan bagi pembeli, maka ia akan mencari barang pengganti yang lebih menguntungkan. Dengan demikian efisiensi akan menjadi tuntutan bagi setiap pelaku ekonomi, sehingga efisiensi nasional dapat dicapai yang pada gilirannya akan tercipta kesejahteraan umum masyarakat.¹⁵

Dalam hal perusahaan-perusahaan secara makro memproduksi barang/jasa yang melebihi kebutuhan para pembelinya, harga akan jatuh. Dalam kondisi demikian harga tidak menguntungkan bagi perusahaan dan dengan sendirinya perusahaan akan mengurangi jumlah produksi. Dengan pengurangan produksi, maka terdapat keseimbangan jumlah barang yang dibawa ke pasar sehingga harga akan naik lagi. Naiknya harga akan mengurangi minat para pembeli karena tidak menguntungkan, sehingga pembeli akan mencari barang lain yang dapat menggantikannya dengan harga lebih murah. Harga berfungsi sebagai motivator para pelaku ekonomi. Harga pasar memantapkan penghargaan dan hukuman (*reward-penalty*) yang secara ekonomi dinyatakan sebagai laba-rugi (*profit-loss*).

Karena dalam perekonomian pasar seluruh individu diberi kebebasan untuk menentukan barang apa yang diproduksi, maka di pasar terdapat banyak

¹⁵Schiller, Bradley R., *The Economy Today*, edisi ke-2 (New York: Random House, 1983), hal. 74-75.

perusahaan yang akan memproduksi barang serupa. Hal ini memberikan banyak pilihan bagi para pembeli, sehingga pembeli hanya akan membeli barang/jasa dengan harga yang benar-benar menguntungkannya. Perusahaan yang tidak memberikan keuntungan kepada pembeli akan ditinggalkan pembeli. Dengan demikian harga menjadi alat kontrol otomatis di pasar, sekalipun tanpa campur tangan pemerintah.

4. PEREKONOMIAN PASAR SEBAGAI SISTEM

Untuk memudahkan pembahasan, dalam sistem perekonomian pasar disederhanakan dengan hanya terdapat dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga (*households*) dan perusahaan (*firms*). Sebagai suatu sistem, kedua pelaku ekonomi tersebut saling melakukan interaksi.

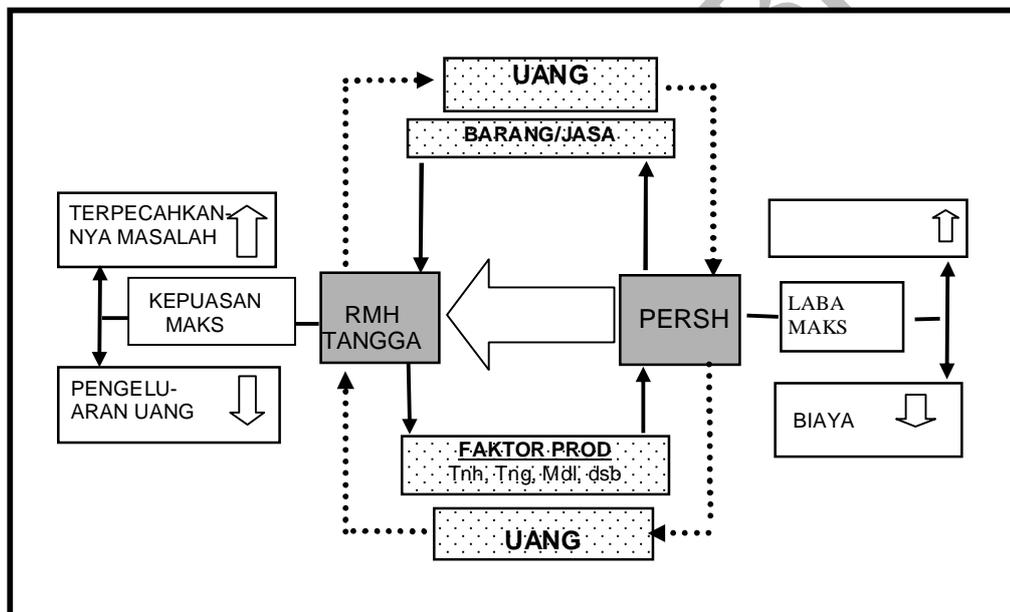
Masyarakat sebagai rumah tangga membelanjakan uangnya untuk mendapatkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut dibeli untuk kepentingan konsumsi dan investasi. Konsumsi adalah pemanfaatan barang/jasa untuk kebutuhan sekarang (*current period*), sedangkan investasi untuk kebutuhan jangka panjang. Barang/jasa yang termasuk kelompok konsumsi adalah barang/jasa tidak awet (*nondurable goods or services*) seperti makanan, pakaian, rekreasi, obat-obatan untuk kesehatan, jasa hukum, pendidikan, bahan bakar, dan sebagainya.¹⁶ Sedangkan yang termasuk belanja investasi adalah pengeluaran uang untuk barang/jasa awet (*durable goods or services*), yaitu barang/jasa yang memiliki masa manfaat jangka panjang seperti untuk barang-barang modal seperti: pabrik, mesin, rumah, dan mobil. Penambahan persediaan barang dagangan juga dikelompokkan sebagai investasi.¹⁷

¹⁶ Gwartney, James D. dan Stroup, Richard L., *Macroeconomics: Private and Public Choice*, edisi ke-6 (Tokyo: The Dryden Press, 1977), hal. 136.

¹⁷ Gwartney, James D. dan Stroup, Richard L., *Ibid*, hal. 137.

Untuk ini rumah tangga berusaha memaksimumkan kebahagiaannya atau kepuasannya, dengan membelanjakan uang yang tersedia untuk membeli sekelompok barang/jasa. Kepuasan konsumen diukur dari seberapa banyak permasalahan yang dihadapinya terpecahkan. Perusahaan memanfaatkan dan mengombinasikan sumber daya berupa faktor produksi secara efisien, untuk memproduksi barang dan jasa dengan tujuan memperoleh dan memaksimumkan laba.¹⁸ Interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dapat diilustrasikan dalam Gambar-3.1 berikut ini:

Gambar-3.1: Sistem Perekonomian Pasar



Interaksi tersebut berjalan terus menerus sehingga membentuk suatu sistem. Sistem dapat diartikan sebagai sebuah wujud keseluruhan dari suatu objek penelaahan, di mana setiap unsur dari objek tersebut berhubungan satu dengan yang lain dalam suatu jalinan tertentu.¹⁹ Dalam suatu sistem, interaksi

¹⁸Schiller, Bradley R., hal. 30.

¹⁹Jujun S. Suriasumantri, *Berpikir Sistem: Konsep, Penerapan, Teknologi, dan Strategi Implementasi* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta), hal. 5.

antara rumah tangga dan perusahaan sebagai unsur dari sistem berlangsung terus, sepanjang seluruh pihak tersebut memperoleh keseimbangan.²⁰ Keseimbangan rumah tangga berupa kepuasan maksimum dan keseimbangan perusahaan berupa laba maksimum.

Kepuasan maksimum rumah tangga diperoleh, jika setiap rupiah dari uang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai barang/jasa memberikan tambahan kepuasan yang sama. Jadi rupiah terakhir yang dibelanjakan untuk barang A memberikan kepuasan yang sama dengan rupiah terakhir yang dibelanjakan untuk barang-barang B, C dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan pengertian ilmu ekonomi, di mana manusia akan berusaha memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Untuk barang dengan kualitas sama, konsumen akan memilih barang yang harganya lebih murah, agar dari jumlah uang yang sama diperoleh barang lebih banyak atau dapat membeli barang lain yang juga diperlukan sehingga diperoleh kepuasan yang lebih besar.²¹

Laba maksimum perusahaan dicapai pada posisi optimum, yaitu jika tambahan pendapatan (*marginal revenue = MR*) dalam bentuk rupiah masih dapat menutup biaya produksi tambahan (*marginal cost = MC*), sebagai akibat dari tambahan produksi (*marginal physical product*).²² Perusahaan hanya akan memproduksi barang/jasa, menambah tenaga kerja, dan memperluas usahanya jika dari tambahan usahanya itu diperoleh tambahan keuntungan.

Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, rumah tangga harus mengeluarkan uang yang dapat diperoleh dengan menjual tenaganya atau menyewakan harta yang telah dimilikinya seperti bangunan, mesin, tanah, atau sumber daya alam.

²⁰Herbert A. Simon, *Administrative Behavior*, edisi ke-4 (Singapore: The Free Press, 1997), hal. 14.

²¹Schiller, Bradley R., *Ibid.*, hal. 421-423.

²²*Op.cit.*, hal. 481.

Barang/jasa yang dijual/disewakan itu disebut sebagai faktor produksi bagi pembeli atau penyewanya, yaitu perusahaan. Faktor produksi tersebut diorganisasikan dan diproses oleh perusahaan sehingga menghasilkan output berupa barang dan jasa. Output dari perusahaan ini diperlukan oleh rumah tangga dengan menyerahkan uangnya kepada perusahaan, dengan demikian terdapat arus barang dan arus uang. Arus uang berasal dari perusahaan untuk membayar faktor produksi kepada rumah tangga dan selanjutnya dari rumah tangga ke perusahaan untuk membayar barang/jasa. Sedangkan arus barang berasal dari rumah tangga dalam bentuk faktor produksi (*input*) kepada perusahaan dan berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ke rumah tangga.

Memperhatikan sistem perekonomian pasar tersebut dapat dimengerti bahwa sistem tersebut dapat berlangsung secara terus menerus karena kedua belah pihak, yaitu rumah tangga sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen mendapatkan keuntungan. Dengan sistem tersebut nampak ada kerja sama yang saling menguntungkan.

Sebenarnya sistem yang saling menguntungkan tersebut tidak hanya berlaku pada sistem perekonomian yang berorientasi laba, tetapi juga pada lembaga-lembaga lain, termasuk bagi sektor pemerintah. Pemerintah selaku lembaga sebenarnya berfungsi sebagai perusahaan yang memproduksi jasa dan jasa yang diperlukan masyarakat. Jasa-jasa sektor pemerintahan tersebut berbentuk keamanan, ketenangan, stabilitas, pendidikan, transportasi dan sebagainya. Seluruh instansi sebagai aparat negara/pemerintah mempunyai andil dalam memproduksi jasa tersebut. Kepolisian RI memproduksi jasa di bidang keamanan. Karena jasa keamanan tersebut diperlukan oleh masyarakat, maka masyarakat melalui keuangan negara membayar jasa tersebut dengan membiayai seluruh keperluan kepolisian tersebut. Masyarakat mau membayar jasa keamanan tersebut karena masyarakat memerlukan ketenangan dan keamanan. Masyarakat tidak akan bekerja dengan tenang jika situasi yang ada

selalu mengancam keselamatannya. Oleh karena itu, jika terdapat kinerja suatu instansi yang tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat, akan mendapatkan kritikan atau tantangan dari masyarakat karena mereka merasa rugi “membayar” melalui anggaran negara.

5. SISTEM PEREKONOMIAN CAMPURAN

Jika perekonomian terpusat menekankan pada perencanaan dan pengendalian pemerintah dan sistem perekonomian pasar menekankan pada kebebasan individu, sistem perekonomian campuran berada di antara keduanya. Sistem perekonomian campuran muncul sebagai modifikasi atas besarnya tingkat campur tangan pemerintah dalam perekonomian.²³ Sistem perekonomian campuran yang melibatkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian ini, mulai banyak digunakan sejak terjadinya resesi ekonomi dunia pada tahun-tahun 1929-1932.²⁴ Dalam sistem perekonomian campuran, baik individu/swasta maupun pemerintah berperan dalam pengendalian ekonomi. Swasta berperan dalam mekanisme pasar, sedangkan pemerintah berperan dalam regulasi melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan moneter dan fiskal.²⁵

Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan sistem perekonomian pasar atau pun terencana secara mutlak. Meskipun dikenal sangat bebas, perekonomian di Amerika Serikat tetap tergolong sebagai perekonomian campuran, karena pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (*advertising*) dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara

²³ Lipsey, Richard G. dan Steiner, Peter O., hal. 850.

²⁴ Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1981), hal. 14-15.

²⁵ Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D., hal. 41-42.

perekonomian terpusat, juga tidak menerapkannya secara ekstrim. Dewasa ini, banyak negara yang semula menerapkan perekonomian terpusat seperti negara-negara eks Blok Timur (Uni Soviet, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Romania, Albania) telah menyerahkan sebagian perekonomiannya ke swasta dengan melakukan privatisasi, yakni mengubah status perusahaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.²⁶

Sistem perekonomian campuran berusaha memanfaatkan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan-keburukan yang ada pada perekonomian terpusat dan perekonomian pasar. Kebaikan perekonomian terpusat adalah adanya peran pemerintah dalam usaha membantu masyarakat yang lemah. Sedangkan keburukannya adalah tidak diberikannya kebebasan individu dalam pengaturan perekonomian. Adapun kebaikan perekonomian pasar adalah diberikannya peran individu, untuk berkreasi dalam menggali potensi agar dapat dikembangkan. Sedangkan keburukannya adalah kebebasan bersaing, sehingga pemenangnya dapat menguasai pasar yang cenderung menekan masyarakat yang lemah.

Dengan sistem perekonomian campuran, peran pemerintah dalam mengatur perekonomian tetap dipertahankan, namun peran individu juga didorong. Peran pemerintah diwujudkan dalam bentuk pembuatan berbagai kebijakan seperti menjaga stabilitas makro ekonomi, pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), pengentasan kemiskinan dan pengangguran, kebijakan industrialisasi yang berwawasan lingkungan, optimalisasi sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan dan sebagainya. Stabilitas makro ekonomi dilakukan untuk menjaga agar harga tetap terjangkau masyarakat. Dalam sistem perekonomian ini, investasi swasta dan asing dapat dipertahankan dengan kebijakan yang mengatur persaingan sehat dan bersinergi dengan UKM.

²⁶ Griffin R dan Ronald Elbert. 2006. *Business*. New Jersey: Pearson Education, Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, *Sistem perekonomian*, http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian

6. LATIHAN

- 1) Apa yang dimaksud dengan sistem perekonomian?
- 2) Sebutkan tiga bentuk sistem perekonomian yang umum diterapkan di berbagai negara dan jelaskan ciri masing-masing.
- 3) Sistem perekonomian campuran berusaha memanfaatkan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan-keburukan yang ada pada perekonomian terpusat dan pasar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut dan berikan contoh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menerapkan sistem perekonomian campuran.

BAB IV P A S A R

Tujuan Pemelajaran

Setelah mempelajari bab ini para peserta diharapkan mampu memahami pengertian pasar, penawaran agregat, dan permintaan agregat, keseimbangan pasar, dan struktur persaingan pasar.

1. PENGERTIAN PASAR

Pada mulanya, pasar dinyatakan sebagai tempat di mana barang-barang diperdagangkan. Dengan pengertian ini kita mengenal “pasar ikan”, yaitu tempat di mana setiap pagi para pedagang dan para pembeli ikan bertemu untuk melakukan transaksi jual-beli. Namun dalam kondisi yang lebih maju, pasar didefinisikan sebagai adanya pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan negosiasi jual-beli atas barang/jasa tertentu. Para ekonom membedakan antara pasar barang (*product market*), yaitu pasar atas barang/jasa sebagai hasil dari perusahaan dan pasar faktor produksi (*production factors market*), yaitu pasar atas faktor produksi dari rumah tangga kepada perusahaan.²⁷ Untuk selanjutnya, kita mengikuti pengertian pasar dalam artian fungsional, yaitu adanya pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, bukan dalam arti fisik sebagai tempat.

2. PENAWARAN DAN PERMINTAAN

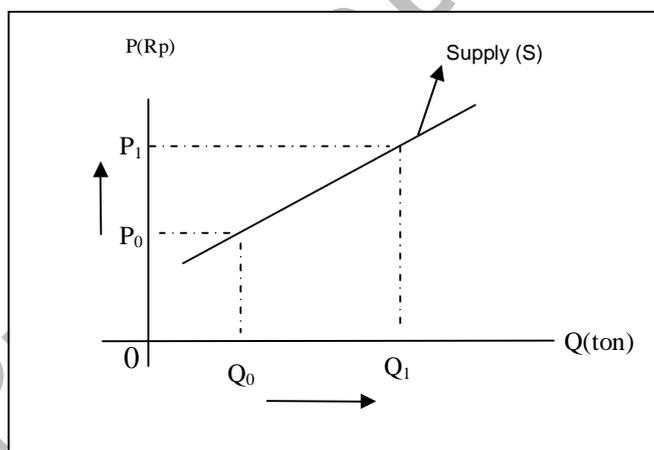
Dari pengertian pasar ini kita mengetahui bahwa di dalam pasar terdapat dua kekuatan. Kekuatan pertama adalah penjual dan yang kedua adalah pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang/jasa, sehingga penjual disebut juga sebagai pemasok barang/jasa (*supplier*), dan aktivitasnya disebut penawaran

²⁷Lipsey, Richard G. dan Steiner, Peter O., hal. 48.

(*supply*). Sedangkan pembeli adalah pihak yang meminta barang/jasa untuk dibeli, sehingga pembeli disebut juga sebagai peminta barang/jasa (*demander*), dan aktivitasnya disebut permintaan (*demand*).

Penawaran adalah suatu rencana bagi seorang penjual, untuk menetapkan berapa banyak jumlah barang yang akan dijual pada berbagai kemungkinan harganya. Hukum penawaran mengatakan bahwa jika harga jual barang/jasa tinggi, maka penjual akan menjual barang/jasa dalam jumlah yang lebih banyak. Harga yang tinggi akan menguntungkan penjual sehingga mereka akan terdorong untuk memproduksi atau menjual lebih banyak. Sebaliknya jika harga jualnya rendah, penjual hanya bersedia menjual dalam jumlah yang sedikit, bahkan jika harganya terlalu rendah mereka tidak sanggup memproduksinya. Jadi terdapat korelasi positif antara harga dan jumlah barang yang dijualnya. Korelasi positif antara harga ($P = price$) dan jumlah barang ($Q = quantity$) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

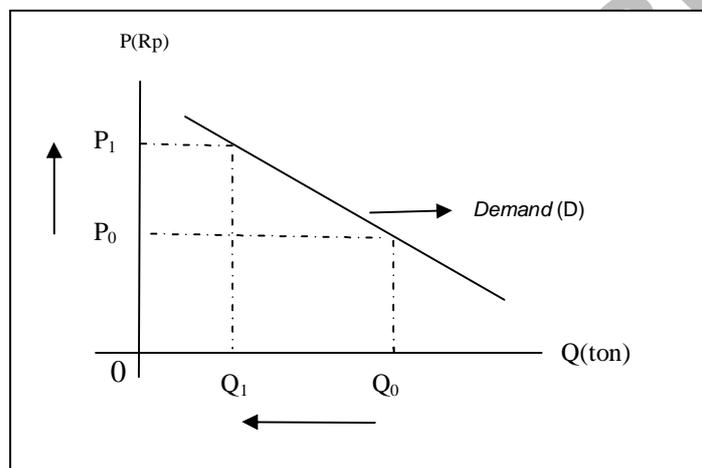
GAMBAR-4.1: KURVA PENAWARAN (SUPPLY)



Permintaan adalah suatu rencana bagi pembeli untuk menetapkan berapa banyak jumlah barang (Q) yang akan dibeli pada berbagai kemungkinan harga (P). Hukum permintaan mengatakan bahwa jika harga barang/jasa tinggi, pembeli akan membeli barang/jasa dalam jumlah yang lebih sedikit. Harga yang tinggi akan membebani keuangan pembeli, sehingga mereka hanya akan membeli dalam

jumlah yang sedikit saja. Sebaliknya jika harganya rendah, pembeli bersedia membeli dalam jumlah yang lebih banyak karena: (1) dengan jumlah uang yang sama akan diperoleh barang yang lebih banyak, (2) pembeli yang semula tidak mampu membeli akan mampu membeli dan (3) manfaat yang diperoleh dari tambahan barang (*marginal revenue*) yang dibeli semakin berkurang. Jadi terdapat korelasi negatif antara harga dan jumlah barang yang dibelinya. Korelasi negatif antara harga dan jumlah barang dapat digambarkan kurvanya pada Gambar-4.2 di bawah ini.

Gambar-4.2: KURVA PERMINTAAN (DEMAND)

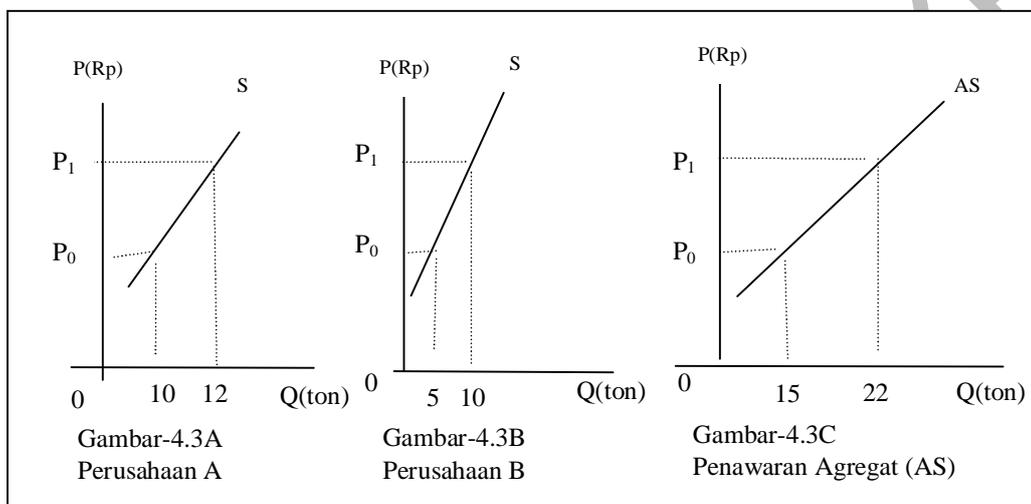


3. PENAWARAN AGREGAT DAN PERMINTAAN AGREGAT

Kurva penawaran tersebut pada Gambar-4-1 menunjukkan perilaku seorang penjual individual, yang berarti persoalan ekonomi mikro. Namun jika seluruh penawaran yang ada dalam suatu wilayah atau negara kita gabungkan, maka penawaran gabungan tersebut menjadi penawaran agregat atau penawaran pasar (*aggregate supply*). Cara menggabungkan beberapa penawaran individual menjadi penawaran agregat dapat dilihat pada Gambar-4.3 yang terdiri dari tiga kurva. Gambar-4.3A menunjukkan penawaran perusahaan A, Gambar-4.3B menunjukkan penawaran perusahaan B, dan Gambar-4.3C menunjukkan penawaran gabungan

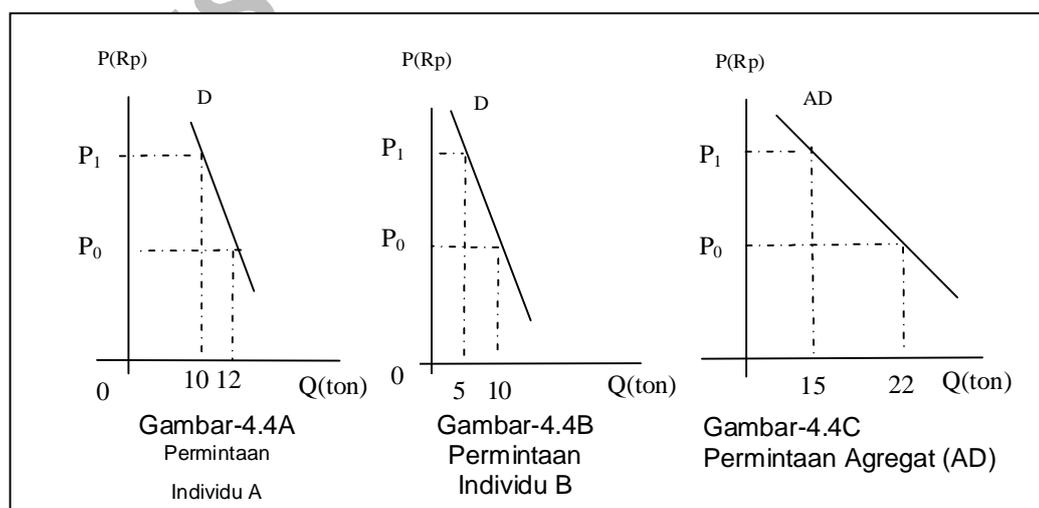
sebagai penjumlahan dari kurva pada Gambar-4.3A dan Gambar-4.3B. Dapat dilihat pada harga P_0 , jumlah barang (Q) yang ditawarkan oleh perusahaan A sebanyak 10 unit dan penawaran perusahaan B sebanyak 5 unit, sehingga jumlah penawaran agregatnya ($A+B$) sebanyak 15 unit. Begitu pula pada P_1 , penawaran agregat sebanyak 22 unit berasal dari penawaran perusahaan A sebanyak 12 unit dan dari perusahaan B sebanyak 10 unit.

Gambar-4.3: KURVA PENAWARAN AGREGAT



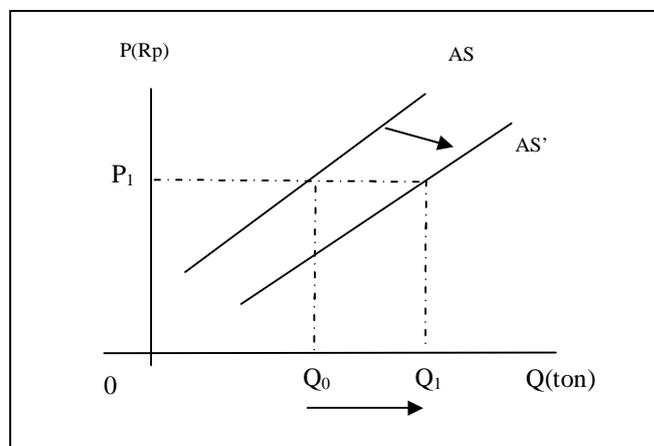
Sebagaimana halnya kurva penawaran, menjumlahkan kurva-kurva permintaan individual menjadi permintaan agregat nampak pada Gambar-4.4 di bawah ini.

Gambar-4.4: KURVA PERMINTAAN AGREGAT



Kurva Penawaran Agregat dapat naik atau turun mengikuti fakta di lapangan. Penawaran Agregat dapat naik (kurva AS bergeser ke kanan), antara lain karena adanya penurunan biaya produksi secara makro, turunnya pajak tidak langsung, ditemukannya teknologi yang lebih efisien, dan sebagainya. Sedangkan penurunan Penawaran Agregat turun (kurva AS bergeser ke kiri) jika terjadi kondisi sebaliknya. Gambar yang menunjukkan naiknya Penawaran Agregat adalah sebagai berikut:

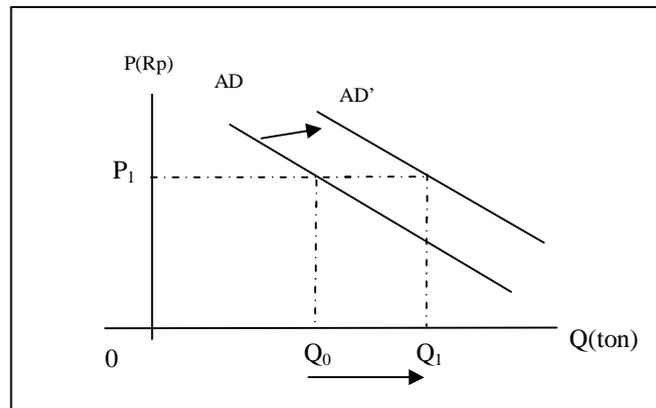
Gambar-4.5: KURVA PENAWARAN AGREGAT NAIK



Naiknya penawaran agregat dari AS ke AS' pada Gambar-4.5 ditandai dengan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan, dari sebanyak OQ_0 menjadi OQ_1 yang berarti ada kenaikan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak Q_0-Q_1 sekalipun harga barang tidak naik, yaitu sebesar P_1 .

Kurva Permintaan Agregat juga dapat naik atau turun mengikuti fakta di lapangan. Permintaan Agregat dapat naik (kurva AD bergeser ke kanan) antara lain terjadi karena meningkatnya pendapatan masyarakat, kenaikan gaji pegawai negeri, turunnya pajak perorangan, para petani yang sedang mengalami panen raya yang menguntungkan dan sebagainya. Permintaan Agregat turun (kurva AD bergeser ke kiri) jika terjadi kondisi sebaliknya. Gambar 4-6 menunjukkan naiknya Permintaan Agregat.

Gambar-4.6: KURVA PERMINTAAN AGREGAT NAIK



Naiknya permintaan agregat dari AD ke AD' pada Gambar-4.6 ditandai dengan bertambahnya jumlah barang yang diminta, dari sebanyak OQ_0 menjadi OQ_1 yang berarti ada kenaikan jumlah barang yang diminta sebanyak Q_0-Q_1 sekalipun harga barang tidak naik, yaitu sebesar P_1 .

4. KESEIMBANGAN PASAR

Proses negosiasi antara calon penjual dan calon pembeli diakhiri dengan dilakukannya transaksi. Transaksi terjadi jika telah terdapat keseimbangan (*equilibrium*), di mana terdapat kesamaan jumlah (Q) yang dijual dan jumlah yang ditawarkan pada harga yang disepakati. Contoh daftar penawaran dan permintaan dapat dilihat pada Tabel-4.1 di bawah ini:

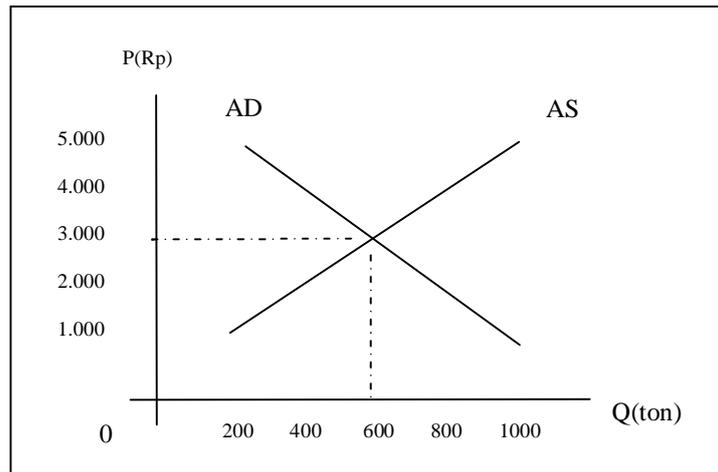
Tabel-4.1 DAFTAR PENAWARAN AGREGAT DAN PERMINTAAN AGREGAT KOMODITAS BERAS DI JAKARTA

Harga (P) Rp/kg	Jumlah Beras (Q) yang ditawarkan/hari (dalam ton)	Jumlah Beras (Q) yang diminta/hari (dalam ton)
1.000,00	200	1.000
2.000,00	400	800
3.000,00	600	600
4.000,00	800	400
5.000,00	1.000	200

Sumber Data: Ilustrasi

Berdasarkan Tabel-4.1 diketahui keseimbangan terjadi pada harga Rp3.000,00/kg dengan volume transaksi sebanyak 600 ton/hari. Tabel tersebut dapat dibuat kurva seperti nampak pada Gambar-4.7 di bawah ini:

Gambar-4.7: KURVA KESEIMBANGAN PASAR



Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dengan kekuatan tangan tak nampak (*invisible hand*), dalam Sistem Perekonomian Pasar akan terjadi kontrol otomatis antar pelaku pasar sekalipun tanpa adanya campur tangan pemerintah. Jika ada suatu paksaan dari pemerintah (misalnya) bahwa harga ditetapkan lebih tinggi daripada keseimbangan pasar, misalnya Rp5.000,-/kg, maka akan terjadi distorsi pasar. Pada harga tersebut, penawaran agregat membawa barang ke pasar sebanyak 1.000 ton, sedangkan permintaan agregat hanya mau membeli sebanyak 200 ton. Dengan demikian terjadi kelebihan pasokan beras (*excess supply*) sebanyak 800 ton. Dalam kondisi seperti ini, para penjual tidak mau rugi karena produknya tidak terjual. Untuk mengatasi hal ini, para penjual yang terlanjur memproduksi dalam jumlah yang lebih besar dari pada yang diminta, terpaksa menjualnya secara obral di bawah harga pemerintah dan pada kesempatan berikutnya mereka akan mengurangi produksinya. Dengan harga obral tersebut, pembeli akan menambah jumlah pembeliannya dan pada kesempatan berikutnya (karena para penjual mengurangi produksinya) harga akan naik sehingga para pembeli mau tidak mau harus mengurangi jumlah pembeliannya.

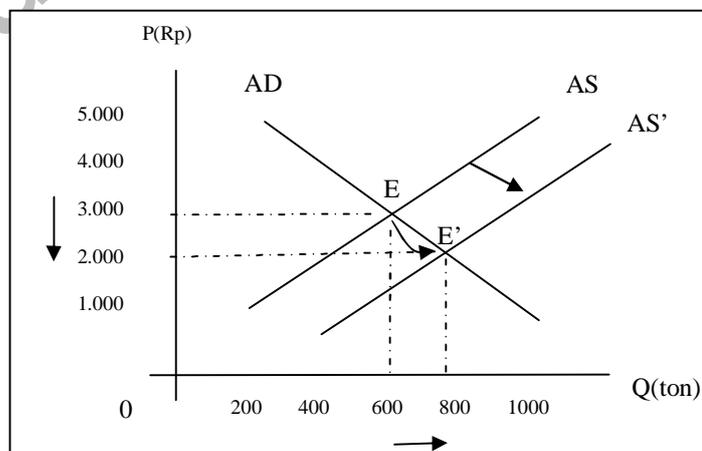
Dengan adanya aksi-reaksi antara para penjual dan pembeli tersebut selanjutnya terjadi keseimbangan baru, yakni berkisar pada keseimbangan yang lama. Oleh karena itulah para ekonom cenderung menyarankan agar pemerintah tidak terlalu melakukan campur tangan dalam perekonomian. Dalam era globalisasi ini kehendak mengikuti mekanisme pasar juga mendapat dukungan dari masyarakat internasional, yang nampak akan diberlakukannya liberalisasi ekonomi dalam AFTA, APEC, WTO dan sebagainya.

Sehubungan dengan adanya pergeseran penawaran agregat dan atau permintaan agregat, baik pergeseran naik atau turun, dampaknya adalah terjadi perubahan keseimbangan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

- a. Penawaran agregat naik, permintaan agregat tetap.

Turunnya penawaran agregat (pada Gambar-4.8: dari AS ke AS') dapat terjadi karena terdapat peningkatan pasokan barang di pasar tanpa didahului oleh perubahan harga. Contohnya, pada musim panen raya padi, sekalipun harga gabah tidak naik, namun panen tetap berlangsung. Dampaknya, harga turun (lihat Gambar-4.8: dari keseimbangan semula pada titik E bergeser ke titik E', yaitu semula pada harga Rp3.000,00 menjadi Rp2.000,00), sedangkan jumlah yang ditransaksikan naik (dari 600 ton menjadi 800 ton). Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut.

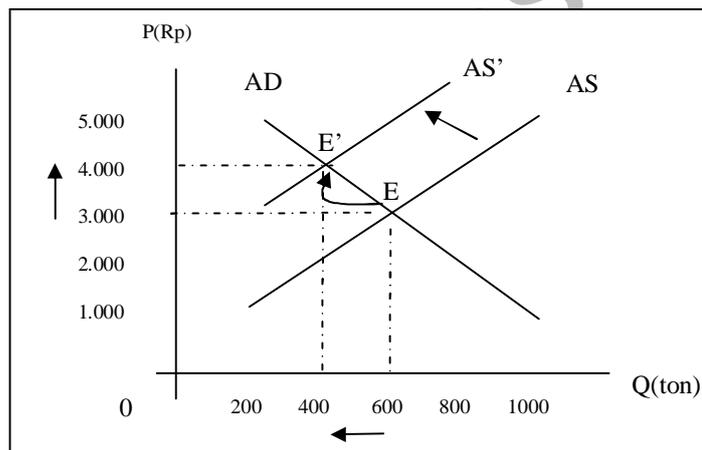
Gambar-4.8: PERUBAHAN KESEIMBANGAN PASAR AKIBAT NAIKNYA PENAWARAN AGREGAT



b. Penawaran agregat turun, permintaan agregat tetap

Turunnya penawaran agregat (pada Gambar-4.9: dari AS ke AS') dapat terjadi karena terdapat penurunan pasokan barang di pasar tanpa didahului oleh perubahan harga. Contohnya, pada musim paceklik di mana tidak ada tambahan pasokan, di lain pihak persediaan gabah semakin menipis. Dampaknya, harga naik (lihat Gambar-4.9: dari keseimbangan semula pada titik E bergeser ke titik E', yaitu semula pada harga Rp3.000,00 menjadi Rp4.000,00), sedangkan jumlah yang ditransaksikan turun (dari 600 ton menjadi 400 ton). Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut.

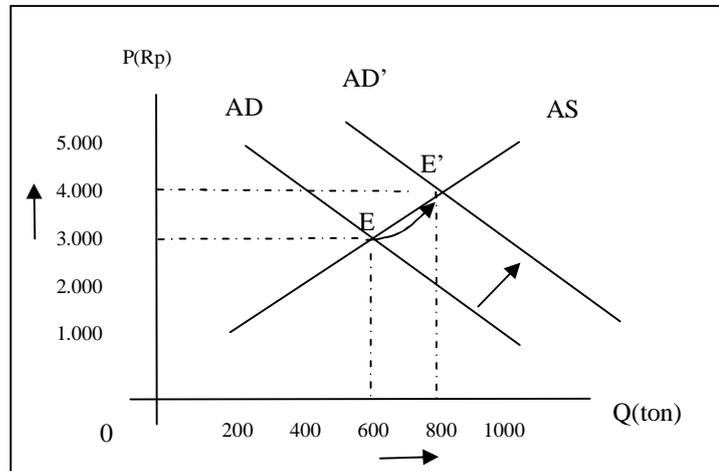
Gambar-4.9: PERUBAHAN KESEIMBANGAN PASAR AKIBAT TURUNNYA PENAWARAN AGREGAT



c. Permintaan agregat naik, penawaran agregat tetap

Naiknya permintaan agregat (pada Gambar-4.10: dari AD ke AD') dapat terjadi karena naiknya pendapatan masyarakat sehingga masyarakat berbelanja lebih banyak daripada biasanya. Dampaknya, harga naik (lihat Gambar-4.10: dari keseimbangan semula pada titik E bergeser ke titik E', yaitu semula pada harga Rp3.000,00 menjadi Rp4.000,00), sedangkan jumlah yang ditransaksikan naik (dari 600 ton menjadi 800 ton). Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut.

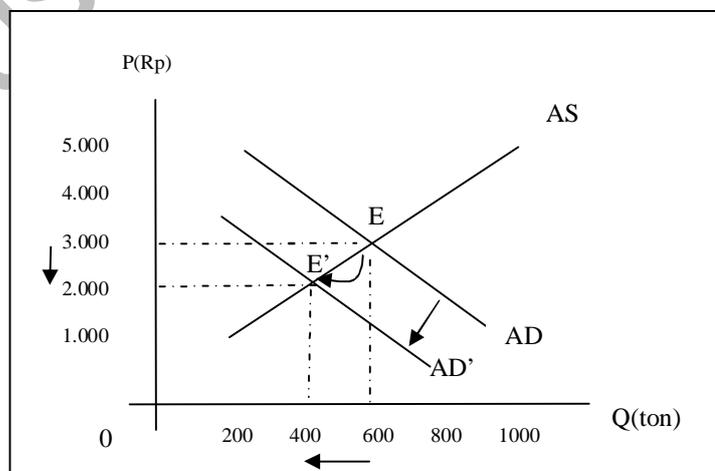
Gambar-4.10: PERUBAHAN KESEIMBANGAN PASAR AKIBAT NAIKNYA PERMINTAAN AGREGAT



d. Permintaan agregat naik, penawaran agregat tetap

Turunnya permintaan agregat (pada Gambar-4.11: dari AD ke AD') dapat terjadi karena turunnya pendapatan masyarakat sehingga daya beli masyarakat untuk berbelanja menurun. Dampaknya, harga naik (lihat Gambar-4.11: dari keseimbangan semula pada titik E bergeser ke titik E', yaitu semula pada harga(Rp3.000,00 menjadi Rp2.000,00), dan jumlah yang ditransaksikan turun (dari 600 ton menjadi 400 ton). Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar-4.11: PERUBAHAN KESEIMBANGAN PASAR AKIBAT TURUNNYA PERMINTAAN AGREGAT



Dalam kenyataan di lapangan, kenaikan/penurunan penawaran dan atau permintaan agregat hanya terjadi secara sebagian-sebagian, misalnya hanya ada kenaikan penawaran agregat saja pada posisi permintaan tetap. Sangat mungkin, perubahan terjadi secara bersama, baik di sisi penawaran agregat maupun permintaan agregat. Tingkat kenaikan dan atau penurunan masing-masing pun berbeda-beda, tergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Dengan demikian tingkat perubahan harga maupun jumlah yang ditransaksikan juga berbeda-beda. Untuk mengetahui kondisi perubahan yang sebenarnya terjadi di lapangan, diperlukan pengamatan atau penelitian secara seksama.

5. PERAN PEMERINTAH DALAM KESEIMBANGAN PASAR

Dalam perekonomian campuran, pemerintah biasanya melakukan campur tangan terhadap mekanisme pasar dengan tujuan untuk melakukan stabilitas ekonomi makro. Pemerintah berperan sebagai regulator, yakni membuat berbagai peraturan untuk menjaga agar tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang mengganggu, baik pada sisi penawaran agregat maupun pada permintaan agregat. Untuk itu pemerintah dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kekuatan pasar, yakni melalui penawaran agregat atau permintaan agregat.

Campur tangan secara langsung, pemerintah secara langsung terlibat dalam permintaan atau penawaran di pasar. Misalnya, pemerintah melakukan pembelian gabah atau beras dari petani pada musim panen, untuk disimpan di gudang-gudang pemerintah dan menjualnya melalui operasi pasar pada musim paceklik. Langkah pemerintah tersebut dilakukan untuk menampung kelebihan produksi pada musim panen, agar harga tidak jatuh sehingga petani tidak merugi dan menambah pasokan (penawaran) pada musim paceklik, agar harga tidak naik sehingga masyarakat konsumen tetap dapat membeli beras.

Campur tangan secara tidak langsung, dimana pemerintah secara tidak langsung terlibat dalam permintaan atau penawaran di pasar, campur tangan yang

dilakukannya melalui pembuatan peraturan-peraturan. Misalnya, ketika harga minyak goreng di luar negeri naik, para produsen banyak mengekspor minyak goreng tersebut ke luar negeri. Dalam kondisi seperti ini di dalam negeri terjadi kelangkaan sehingga harga di dalam negeri naik. Untuk ini pemerintah dapat mengenakan pajak ekspor atas minyak goreng, agar barang tersebut tidak diekspor. Harapannya, minyak goreng tetap tersedia di dalam negeri. Dengan pajak ekspor, pengusaha akan mengurangi ekspornya sehingga sebagian besar barangnya dijual di dalam negeri.

Campur tangan pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasar, juga dapat dilakukan dengan membuat peraturan yang mewajibkan instansi pemerintah, untuk memprioritaskan pembelian barang-barang produksi dalam negeri, melarang ekspor hasil-hasil alam dalam bentuk asal (belum diolah) dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan usaha dalam negeri sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.

Untuk menjaga agar persaingan pasar berjalan secara sehat, banyak negara telah membuat peraturan yang melarang praktik monopoli dan oligopoli. Hal ini dilakukan karena keduanya cenderung merugikan konsumen. Di Amerika Serikat ada berbagai peraturan yang melarang praktik monopoli dan persekongkolan bisnis, yaitu: *the Sherman Act* (1890), *the Federal Trade Commission Act* (1914), *the Clayton Act* (1914), *the Robinson-Patman Act* (1936), dan *the Celler-Kefauver Act* (1950). Sedangkan di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁸ Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong persaingan terbuka/sehat di pasar. Aturan tersebut menyatakan monopoli dan upaya memonopoli sebagai perbuatan melawan hukum.²⁹

²⁸ Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 93.

²⁹Walton M. Gary dan Frank C. Wykoff, hal. 177-178.

Monopoli terjadi jika di pasar/industri hanya ada satu perusahaan yang memproduksi atau menjual suatu komoditas. Karena hanya ada satu perusahaan, perusahaan tersebut secara sempurna dapat menetapkan harga. Dalam kondisi demikian konsumen tidak dapat berbuat lain karena tidak ada penjual lain. Pilihan yang dapat dilakukan hanya membeli atau tidak membeli. Dalam praktik, monopoli murni juga jarang terjadi, yang sering adalah monopoli yang diatur oleh negara, yakni oleh perusahaan milik negara (BUMN).³⁰ Monopoli oleh BUMN dimaksudkan agar pemerintah dapat mengendalikan perusahaan yang bersangkutan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Persaingan oligopoli terjadi jika di pasar/industri hanya ada beberapa penjual, sehingga masing-masing perusahaan mempunyai pangsa pasar yang cukup besar. Pada pasar oligopoli, karena hanya ada beberapa perusahaan yang beroperasi, maka antar perusahaan sering tidak melakukan persaingan, sebaliknya malah melakukan kolusi, yang sering disebut sebagai kartel. Dengan kolusi ini mereka menetapkan harga secara bersama-sama, membatasi jumlah produksi dengan menentukan kuota, membagi wilayah pasar dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya. Jika para oligopolis telah melakukan kolusi, maka kekuatan menetapkan harga sama dengan monopoli, sehingga cenderung merugikan konsumen.

³⁰Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D., hal. 509.

6. LATIHAN

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan pasar.
- 2) Sebutkan dan jelaskan dua kekuatan utama dalam mekanisme pasar.
- 3) Jelaskan kapan dapat dinyatakan bahwa keseimbangan pasar telah terjadi.
- 4) Jelaskan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang menerapkan sistem perekonomian campuran, untuk menjaga stabilitas harga dan memperluas kesempatan kerja.
- 5) Jelaskan apa tujuan dibuatnya peraturan yang melarang praktik monopoli dan oligopoli.
- 6) Jelaskan alasan apa yang mendasari diijinkannya monopoli oleh BUMN.
- 7) Diskusikan, apa kebaikan dan keburukan dilakukannya impor beras oleh pemerintah atau perusahaan yang ditunjuk ketika harga beras di dalam negeri meningkat. Berikan saran-saran, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga beras di dalam negeri.

BAB V

PENDAPATAN NASIONAL

Tujuan Pemelajaran

Setelah mempelajari bab ini para peserta diharapkan mampu memahami pengertian pendapatan nasional, pendekatan, hierarki dan metode penghitungannya, serta kelemahan konsep pendapatan nasional.

1. PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL

Lipsey dan Steiner mendefinisikan Pendapatan Nasional sebagai nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama satu tahun. Nilai yang dimaksud dalam perhitungan pendapatan nasional adalah nilai jual, dengan sendirinya termasuk pajak-pajak yang timbul atas transaksi penjualan barang/jasa tersebut.³¹ Pendapatan nasional dapat juga disebut sebagai Produk Nasional. Produk nasional mengindikasikan nilai jual dari seluruh produk yang dihasilkan, sedangkan Pendapatan Nasional mengindikasikan jumlah yang dibayarkan oleh seluruh pelaku ekonomi untuk menghasilkan produk tersebut.³² Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pendapatan Nasional adalah pendapatan bersih seluruh warga negara dari suatu negara selama satu tahun.³³

2. PENDAPATAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Karena pendapatan nasional adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara, maka besar atau

³¹Lipsey, Richard G. dan Steiner, Peter O., hal. 491-492.

³²Lipsey, Richard G. dan Steiner, Peter O., hal. 491-492.

³³Badan Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia National Income of Indonesia*, Katalog BPS: 9201 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia, 2002), disarikan dari hal. 101.

kecilnya pendapatan nasional dapat dilihat sebagai gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan. Penghitungan pendapatan nasional dilakukan setiap tahun, untuk mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang hanya diukur dengan pendapatan nasional tidak linier atau tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan nasional yang meningkat dari tahun ke tahun belum tentu diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat pada umumnya akan ikut meningkat, jika meningkatnya pendapatan nasional diikuti oleh pemerataan di antara penduduknya. Oleh karena itu, seharusnya sasaran pemerintah tidak hanya pada meningkatnya pendapatan nasional, melainkan harus diikuti dengan upaya pemerataan. Hal-hal yang menyebabkan tidak paralelnya konsep pendapatan nasional dengan kesejahteraan masyarakat, dibahas pada butir 8 bab ini tentang kelemahan dalam konsep pendapatan nasional. Sedangkan tentang pemerataan hasil pembangunan dibahas pada bab VII.

3. PENDEKATAN PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Lipsey dan Steiner mengemukakan bahwa penghitungan Pendapatan Nasional dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu Pendekatan Pengeluaran (pengeluaran uang dari rumah tangga ke perusahaan) dan Pendekatan Produksi (nilai produk seluruh perusahaan yang diserahkan ke rumah tangga). BPS juga menerapkan dua pendekatan tersebut. Tidak ada perbedaan hasil penghitungan dari dua pendekatan ini karena kedua pendekatan tersebut sebenarnya menghitung besarnya aliran pendapatan yang sama. Perbedaannya hanya karena titik aliran tempat melakukan penghitungan. Dari Gambar-2.1 Bab II dapat diketahui bahwa sebenarnya terdapat empat pendekatan. Dengan demikian selain dua pendekatan tersebut masih terdapat

dua pendekatan lagi, yaitu Pendekatan Biaya Faktor Produksi dan Pendekatan Pendapatan. Secara akuntansi, dari empat pendekatan tersebut seharusnya menghasilkan angka yang sama.

4. HIERARKI PENGHITUNGAN PENDAPATAN DAN ARTINYA

Ada enam istilah yang berhubungan dengan Pendapatan Nasional, yaitu: (1) Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product = GDP*),³⁴ (2) Produk Nasional Bruto (*Gross National Product = GNP*), (3) Produk Nasional Neto (*Net National Product = NNP*), (4) Pendapatan Nasional (*National Income = NI*), (5) Pendapatan Perorangan (*Personal Income = PI*), dan (6) Pendapatan Disposibel (*Disposable Income = DI*).³⁵ Masing-masing istilah tersebut berhubungan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian dalam mendiskusikan masalah pendapatan nasional ini perlu ada kejelasan terlebih dahulu, istilah mana yang dibicarakan, agar jelas masalahnya. Urutan pengertiannya dibicarakan di bawah ini.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar (termasuk pajak tak langsung) yang diterima oleh seluruh pelaku ekonomi yang lokasinya berada di dalam negeri suatu negara. Karena hanya memperhatikan lokasi dalam negeri, maka tidak termasuk pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri, tetapi termasuk yang diperoleh warga negara asing di dalam negeri. PDB ditambah penghasilan warga negara di luar negeri dan dikurangi penghasilan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri disebut Produk Nasional Bruto (PNB). Produk Nasional Neto (PNN) adalah PNB dikurangi penyusutan atas pemakaian peralatan yang dipakai untuk menghasilkan PNB tersebut. PNN dikurangi pajak tak langsung disebut Pendapatan Nasional (PN). Dengan demikian PN adalah pendapatan bersih dari faktor-faktor produksi, termasuk

³⁴Gordon, Sanford D. dan Dawson, George G., hal. 301.

³⁵Gwartney, James D. dan Stroup, Richard L., hal.151-152.

laba perusahaan. Pendapatan Perorangan (PP) adalah pendapatan bagi seluruh individu warga negara yang tersedia untuk dikonsumsi, untuk ditabung, dan untuk membayar pajak perorangan. Dengan demikian PP adalah PN dikurangi dengan laba perusahaan yang tidak dibagi (laba ditahan), dikurangi pajak atas laba perusahaan, ditambah dengan subsidi yang dibayar oleh pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan Pendapatan Disposibel (PD) adalah PP dikurangi pajak pribadi, yaitu pendapatan seluruh individu yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung. Secara diagram, Hierarki Penghitungan Pendapatan untuk Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

Produk Domestik Bruto (PDB)

ditambah: Pendapatan WNI di LN
dikurang: Pendapatan WNA di DN
 ----- =

Produk Nasional Bruto (PNB)

dikurang: Depresiasi
 ----- =

Produk Nasional Neto (PNN)

dikurang: Pajak tak langsung
 ----- =

Pendapatan Nasional (PN)

ditambah: Subsidi kepada masyarakat
dikurang: - Laba ditahan
 - Pajak atas laba
 ----- =

Pendapatan Perorangan (PP)

dikurang: Pajak pribadi
 ----- =

Pendapatan Disposibel (PD)

Pembagian atas pengertian berbagai pendapatan tersebut dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memilih pendapatan mana yang dipandang relevan dengan kepentingannya. Negara-negara maju lebih mementingkan Produk Nasional Bruto (PNB) dalam melakukan analisis dan mengambil patokan-patokan kebijakan makro,³⁶ sedangkan Indonesia lebih

³⁶Gordon, Sanford D. dan Dawson, George G., hal. 299-300..

memanfaatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai contoh, dikemukakan oleh Gordon dan Dawson bahwa GNP Amerika Serikat tumbuh enam kali lipat sejak tahun 1929 hingga tahun 1989, padahal pertumbuhan jumlah penduduk tidak sampai dua kali lipat. Di Indonesia, penerimaan pajak, besarnya defisit APBN, besarnya belanja menurut sektor, program, biasanya didasarkan atas besarnya Produk Domestik Bruto (PDB).³⁷ PDB pada tingkat regional (provinsi, kabupaten/kota) disebut PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto).

5. METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA

BPS menghitung pendapatan nasional melalui dua pendekatan, yaitu Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pengeluaran, yang keduanya menghasilkan jumlah yang sama. Dengan Pendekatan Produksi, dijumlahkan seluruh nilai produksi yang dikelompokkan ke dalam sembilan lapangan usaha yang meliputi (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, Gas, dan Air Bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dan (9) Jasa-jasa. Sedangkan dengan Pendekatan Pengeluaran dihitung pengeluaran menurut jenis pengeluaran sebagaimana yang lazim dirumuskan dalam bentuk: $Y = C + I + G + (X - M)$, di mana:

Y	=	PDB	G	=	Belanja pemerintah
C	=	Belanja konsumsi	X	=	Ekspor
I	=	Belanja investasi	M	=	Impor

Untuk ini BPS mengelompokkan pengeluaran (belanja) ke dalam enam jenis pengeluaran karena I (investasi) dipisah ke dalam dua kelompok, yakni

³⁷ Kompas, *Rasio Utang Turun Menjadi 71,79 persen*, (Jakarta: Nomor 168, Selasa, 17 Desember 2002), hal. 1.

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto dan Perubahan Stok (persediaan barang). Dengan demikian pengelompokan jenis pengeluaran menurut BPS meliputi: (1) Konsumsi Rumah Tangga, (2) Konsumsi Pemerintah, (3) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, (4) Perubahan Stok, (5) Ekspor Barang/Jasa, dan (6) Impor Barang/Jasa.

Dalam menghitung PDB pendekatan produksi, yang dihitung adalah nilai tambah bruto yang diberikan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Nilai tambah tersebut diperoleh dari perkalian jumlah produksi dengan harga barang yang bersangkutan, selanjutnya dikurangi dengan biayaantara, yakni nilai bahan yang dipergunakan dalam proses produksi. PDB adalah jumlah dari nilai tambah bruto (belum dikurangi penyusutan alat produksi) dari seluruh pelaku ekonomi di dalam negeri selama satu tahun. Karena PDB hanya menghitung nilai produk di dalam negeri, maka di dalam PDB termasuk pendapatan warga negara asing di dalam negeri, tetapi belum termasuk pendapatan warga negara sendiri di luar negeri (perhatikan hierarki perhitungan di atas). Data tersebut dikumpulkan oleh kantor-kantor statistik di kabupaten/kota yang selanjutnya dikompilasi oleh BPS pusat.

6. KONDISI PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA

Di bawah ini disajikan PDB di Indonesia dengan pendekatan pengeluaran dari tahun 2002 s.d. 2006 berdasarkan harga konstan tahun 2000. (Catatan: Jika terdapat perbedaan angka pada bilangan akhir dalam tabel, hanya disebabkan oleh pembulatan).

Tabel-5.1 PDB PENDEKATAN PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 MENURUT JENIS PENGELUARAN (MILYAR RUPIAH)

JENIS PENGELUARAN		TAHUN				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	920.749	956.593	1.004.109	1.043.805	1.078.928
2	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	110.333	121.404	126.248	134.625	147.563
3	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	307.584	309.431	354.865	399.177	404.606
4	Perubahan Stok	13.087	45.996	25.099	18.652	13.095
5	Deskrepancy statistik	9.546	-26.895	8.757	4.319	24.035
6	Ekspor Barang/jasa	566.188	599.516	680.621	785.998	862.504
7	Impor barang/Jasa	422.271	428.874	543.183	635.920	684.077
	Produk Domestik Bruto	1.505.216	1.577.171	1.656.516	1.750.656	1.846.654

Sumber Data:
Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2007

Sedangkan PDB dengan pendekatan produksi dari tahun 2002 s.d. 2006 pendekatan produksi adalah sebagai berikut.

Tabel-5.2 PDB PENDEKATAN PRODUKSI ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA (MILYAR RUPIAH)

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	231.613	240.387	247.163	253.726	261.296
2	Pertambangan & Penggalian	169.932	167.603	160.100	165.085	168.729
3	Industri Pengolahan	419.387	441.754	469.952	491.421	514.192
4	Listrik, Gas, & Air Bersih	9.868	10.349	10.897	11.584	12.263
5	Bangunan	84.469	89.621	96.334	103.483	112.762
6	Perdag, Hotel, Dan Restoran	243.266	256.516	271.142	293.877	311.903
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	76.173	85.458	96.896	109.467	124.399
8	Keuangan, Persewaan & Jasa	131.523	140.374	151.123	161.384	170.495
9	Jasa-jasa	138.982	145.104	152.906	160.626	170.612
	Produk Domestik Bruto	1.505.213	1.577.166	1.656.513	1.750.653	1.846.651

Sumber Data:
Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2007

Berdasar Tabel-5.1 dan Tabel-5.2 diketahui bahwa dengan dua pendekatan, yakni Pendekatan Pengeluaran (Tabel-5.1) dan Pendekatan Produksi (Tabel-5.2) diperoleh hasil (PDB) yang sama. Selanjutnya, dari PDB dapat diteruskan penghitungannya sampai diperoleh Pendapatan Nasional seperti nampak pada Tabel-5.3 berikut ini.

Tabel-5.3 PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (MILYAR RUPIAH)

URAIAN	TAHUN				
	2002	2003	2004	2005	2006
1 Produk Domestik Bruto	1.505.213	1.577.166	1.656.513	1.750.653	1.846.651
2 Pendapatan Neto thd Luar Negeri atas Faktor Produksi*)	-56.357	-81.230	-80.468	-107.381	-115.452
3 Produk Nasional Bruto	1.448.856	1.495.936	1.576.045	1.643.272	1.731.199
4 Penyusutan(depresiasi)	-75.260	-78.858	-82.825	-87.532	-92.332
5 Produk Nasional Neto	1.373.596	1.417.078	1.493.220	1.555.740	1.638.867
6 Pajak Tidak Langsung Neto	-57.684	-65.876	-46.040	-34.580	-55.422
Pendapatan Nasional	1.315.912	1.351.202	1.447.180	1.521.160	1.583.445

*) Pendapatan Neto terhadap Luar Negeri atas Faktor Produksi adalah pendapatan WNA di Indonesia dikurangi dengan pendapatan WNI di luar negeri

Sumber Data:
Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2007

BPS menerbitkan data PDB dan pendapatan nasional baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada daftar terlampir. Yang dimaksud dengan PDB atas dasar harga berlaku adalah PDB yang dihitung berdasarkan harga-harga yang benar-benar terjadi pada tahun dilakukan survey, sehingga di dalamnya termasuk unsur inflasi. Sedangkan yang dimaksud dengan PDB atas dasar harga konstan adalah PDB yang unsur inflasinya telah dihilangkan. Harga konstan yang nampak pada tabel di atas adalah harga konstan tahun 2000, berarti unsur inflasi pada tahun 2002 hingga 2006 telah dihilangkan. Dengan kata lain,

harga-harga pada tahun 2002 – 2006 dinyatakan sama dengan harga pada tahun 2000. Karena unsur inflasinya telah dihilangkan, maka PDB dengan harga konstan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan PDB menurut harga berlaku (bandingkan angka-angka PDB di atas dengan PDB pada daftar terlampir).

Pertumbuhan PDB yang mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah PDB berdasar harga konstan. Peningkatan PDB atas dasar harga berlaku hanya mengindikasikan peningkatan nilai nominal, bukan nilai riil dari pendapatan masyarakat. Cara menghilangkan unsur inflasi adalah dengan mendeflasikan harga berlaku sebesar tingkat inflasi yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.

7. SEKILAS TENTANG INFLASI

Untuk memahami inflasi, secara singkat dapat dikemukakan bahwa inflasi adalah suatu kondisi perekonomian di mana harga-harga pada umumnya naik. Sedangkan kondisi sebaliknya, di mana harga-harga pada umumnya turun, disebut deflasi.³⁸ Penyebab inflasi pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: (a) Inflasi Tarikan Permintaan (*demand pull inflation*) dan (b) Inflasi Desakan Biaya (*cost push inflation*). Inflasi tarikan permintaan terjadi karena ada peningkatan permintaan agregat. Bertambahnya jumlah uang beredar juga dapat mengakibatkan inflasi tarikan permintaan. Data tentang perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia dapat dilihat pada daftar terlampir. Sedangkan inflasi desakan biaya terjadi karena adanya peningkatan biaya produksi pada umumnya, sehingga perusahaan mengurangi jumlah barang yang diproduksi.

McConnel dan Brue menyatakan bahwa pengurangan produksi ini terjadi karena dalam kondisi biaya-biaya faktor produksi naik, biaya produksi (*average*

³⁸ Samuelson, Paul A dan William Samuelson, hal. 255.

cost) per unitnya meningkat sehingga berdampak pada turunnya keuntungan, atau bahkan mengakibatkan kerugian. Dalam kondisi yang lebih parah, perusahaan menutup usahanya, yang berarti penawaran agregat berkurang.³⁹

Dampak inflasi, pada umumnya merugikan masyarakat, baik produsen maupun konsumen. Pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengendalikan inflasi. Pada tahun 2008, pemerintah menargetkan inflasi dapat ditekan pada tingkat 6,0%. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia ditugasi untuk memelihara kestabilan nilai rupiah melalui kebijaksanaan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur/mengawasi bank.

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang:

- a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;
- b. melakukan pengendalian moneter, antara lain melalui:
 - 1) operasi pasar terbuka (menjual/membeli surat-surat berharga seperti sertifikat bank indonesia (SBI), obligasi pemerintah, dan atau surat utang negara yang sering disebut dengan SUN) di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - 2) penetapan tingkat diskonto (bunga uang);
 - 3) penetapan cadangan wajib minimum;
 - 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.

Untuk dapat melakukan pengendalian moneter, Bank Indonesia diperkenankan juga melaksanakan prinsip-prinsip syariah.

³⁹ McConnel R. Campbell dan Stanley L. Brue, *Ibid.*, hal. 155-157.

8. KELEMAHAN DALAM KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

Sekalipun konsep pendapatan nasional telah banyak memberikan manfaat dalam melakukan perencanaan, baik bagi pemerintah maupun para pelaku bisnis, namun terdapat juga beberapa kelemahan, antara lain:

a. Tidak menghitung produk-produk non transaksi

Karena Pendapatan Nasional hanya berorientasi pada harga jual, maka Pendapatan Nasional tidak menghitung nilai-nilai dari pekerjaan yang tidak dipasarkan seperti: pekerjaan ibu-ibu rumah tangga, memperbaiki peralatan milik sendiri, dan sebagainya;

b. Tidak menghitung nilai dari waktu luang (*leisure time*)

Waktu-waktu luang yang sebenarnya sangat berharga bagi masyarakat seperti hari libur, memperpendek jam kerja, dan sebagainya juga tidak dikalkulasi dalam Pendapatan Nasional;

c. Tidak memperhitungkan peningkatan mutu produk

Karena dalam konsep Pendapatan Nasional, terutama dalam hal pertumbuhannya hanya menekankan konsep peningkatan produk riil, maka peningkatan kualitas produk juga tidak tersentuh dalam konsep Pendapatan Nasional;

d. Kurang memperhatikan pentingnya distribusi pendapatan

Konsep Pendapatan Nasional tidak memperhatikan apakah distribusinya telah memenuhi rasa keadilan, karena cenderung lebih mengutamakan peningkatan produk riil secara total;

e. Kurang berorientasi ke pendapatan per kapita

Konsep Pendapatan Nasional juga kurang berorientasi ke pendapatan per kapita. Sangat mungkin Pendapatan Nasional pertumbuhannya sangat signifikan, namun hal itu tidak ada artinya jika jumlah penduduk juga meningkat lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan Pendapatan Nasional;

f. Kurang memperhatikan kerusakan lingkungan

Konsep Pendapatan Nasional yang hanya menghitung penyusutan atas peralatan kerja yang dipergunakan dalam proses produksi, maka penyusutan atas sumber daya alam yang ditandai dengan kerusakan lingkungan karena dieksploitasinya sumber daya alam tersebut tidak diperhitungkan. Bisa jadi, pertumbuhan ekonomi yang positif, jika penyusutan atas sumber daya alam ini dikalkulasikan, hasilnya akan berubah menjadi negatif;

g. Tidak mengkalkulasikan produk-produk dari bisnis siluman

Produk dari bisnis siluman seperti judi gelap, penyelundupan, dan bisnis barang-barang terlarang lainnya, sekalipun secara ekonomi terdapat nilai tambah, namun pasti tidak akan terkalkulasikan dalam Pendapatan Nasional.

9. LATIHAN

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional.
- 2) Jelaskan apa tujuan dari dihitungnya pendapatan nasional.
- 3) Jelaskan hierarki penghitungan pendapatan nasional dan jelaskan pula apa yang dimaksud dengan:
 - a. Produk Domestik Bruto (PDB)
 - b. Produk Nasional Bruto (PNB)
 - c. Produk Nasional Neto (PNN)
 - d. Pendapatan Nasional (PN)
 - e. Pendapatan Perorangan (PP)
 - f. Pendapatan Disposibel (PD)
- 4) Jelaskan apa persamaan dan perbedaan antara PDB Harga Berlaku dan PDB Harga Konstan.
- 5) Jelaskan apakah peningkatan pendapatan nasional secara otomatis dapat diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat pada umumnya telah meningkat?
- 6) Jelaskan apa yang dimaksud dengan inflasi, penyebab terjadinya, dan apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap inflasi.
- 7) Sebutkan dan jelaskan beberapa kelemahan dalam konsep pendapatan nasional.

BABVI

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN ICOR

Tujuan Pemelajaran

Setelah mempelajari bab ini diharapkan para peserta memahami pengertian pertumbuhan ekonomi dan ICOR dan mampu menghitung kebutuhan tambahan dana investasi dalam perencanaan ekonomi makro.

1. PENDAHULUAN

Seperti telah dibahas pada Bab V, pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan dalam bentuk $Y = C + I + G + (X - M)$. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional dapat ditingkatkan melalui peningkatan unsur-unsur Konsumsi (C), Investasi (I), Belanja Pemerintah (G), Ekspor (X), dan melalui penurunan Impor (M). Tanda positif variabel C, I, G, dan X pada persamaan di atas menunjukkan antara Y (PDB atau PDRB) sebagai variabel terikat dengan C, I, G, dan X sebagai variabel bebas berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika C, I, G, dan X meningkat, baik secara terpisah atau secara bersama-sama, akan berdampak pada meningkatnya Y atau PDB/PDRB. Sebaliknya, tanda negatif unsur "M" pada persamaan di atas menunjukkan bahwa antara M dengan Y berkorelasi negatif. Artinya, jika M atau impor meningkat akan berdampak pada menurunnya Y atau PDB/PDRB.

Pada bab ini akan dibahas bagaimana hubungan antara peningkatan unsur I (investasi) terhadap PDB/PDRB. Berdasar rumus di atas dapat diketahui bahwa meningkatnya atau menurunnya Y (PDB/PDRB), disebabkan oleh meningkatnya atau menurunnya variabel bebas C, I, G, X dan M. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa banyak faktor yang berpengaruh pada PDB/PDRB. Namun untuk membahas dampak berbagai variabel bebas tersebut secara bersama-sama akan menyulitkan analisis kita. Untuk memudahkan

analisis dampak perubahan variabel bebas terhadap variabel bebas, ilmu ekonomi telah berusaha menyederhanakan pembahasan, yakni dengan membuat asumsi-asumsi. Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan membahas pengaruh beberapa variabel bebas secara bergantian. Dalam kaitannya dengan permasalahan $Y = C + I + G + (X - M)$ di atas, misalnya kita hanya membahas pengaruh C terhadap Y. Untuk pembahasan ini variabel di luar C dan Y (yakni I, G, X, dan M) diasumsikan tidak berubah (*ceteris paribus*). Dengan asumsi yang sama kita dapat membahas pengaruh I terhadap Y yang dalam hal ini C, G, X, dan M diasumsikan tidak berubah. Pembahasan seperti itu dapat diteruskan hingga seluruh variabel bebas diketahui bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pada giliran berikutnya, baru dilakukan pembahasan pengaruh berbagai variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Jika faktor investasi ternyata mempunyai kontribusi yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah dibandingkan dengan faktor lainnya, maka pemerintah dapat membuat perencanaan untuk meningkatkan modal dalam meningkatkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Pada bab ini hanya akan dibahas hubungan korelasional antara variabel bebas I (investasi) dengan variabel terikat Y (PDB/PDRB).

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Kita perlu mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui bagaimana perkembangan produksi riil suatu negara. Pertumbuhan riil yang mencapai 100 persen mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah menjadi dua kali lipat dibanding sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari besarnya prosentase pertumbuhan ekonomi tahunan.⁴⁰

⁴⁰ McConnell, Campbell R. dan Brue Stanley L., *Economics-Principles, Problems, and Policies*, edisi ke-13 (New York: McGraw-Hill, Inc., 1996). Hal. 379.

Selama ini, salah satu kriteria yang sering digunakan untuk mengetahui keadaan perekonomian di suatu negara atau daerah, adalah pertumbuhan ekonomi dengan melihat pertumbuhan PDB/PDRB. Secara lebih rinci sering pula diulas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno, Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk prosentase. Dengan demikian jika seseorang mengatakan bahwa: "Tahun 2007 ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah 6%," maka yang dimaksud adalah bahwa perekonomian Indonesia, yakni PDB-nya, tahun 2007 meningkat sebesar 6% dibandingkan dengan PDB tahun 2006. Meningkatnya aktivitas perekonomian tersebut, yakni pendapatan nasionalnya, atau PDB-nya, harus dilihat atas dasar harga konstan. Dalam hal perekonomian suatu negara terjadi inflasi, maka unsur inflasinya harus dihilangkan dengan melakukan pendeblasian (ingat pembahasan di bab IV).

Dalam membahas pertumbuhan ekonomi, kita baru membahasnya secara totalitas, yakni besaran PDB/PDRB secara total. Kita belum membahasnya lebih lanjut apakah PDB/PDRB tersebut terdistribusikan secara merata kepada seluruh rakyatnya. Pembahasan tentang pemerataan distribusi pendapatan nasional akan dibahas pada bab lain, yakni di bab VII.

Rumus menghitung pertumbuhan PDB/PDRB adalah:

$$g = \frac{P_n - P_{(n-1)}}{P_{(n-1)}} \cdot 100 \%$$

di mana: g adalah tingkat pertumbuhan, P_n adalah PDB pada tahun yang diteliti, dan $P_{(n-1)}$ adalah PDB setahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada Tabel-5.1 dan Tabel-5.2, kita dapat menghitung pertumbuhan ekonomi dengan membandingkan PDB tahun tertentu dengan PDB tahun sebelumnya. Misalnya, data yang terdapat pada Tabel-5.1 dan Tabel-5.2 dapat dihitung pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya sebagai berikut.

Tabel-6.1 PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2003-2006

TAHUN	PDB HARGA KONSTAN (Rp milyar)	PERTUMBUHAN	
		ABSOLUT (Rp milyar)	% tase (g)
2002	1.505.213		
2003	1.577.166	71.953	4,78*)
2004	1.656.513	79.347	5,03
2005	1.750.653	94.140	5,68
2006	1.846.651	95.998	5,48

*) Contoh cara penghitungan tahun 2003:

$$g = \frac{1.577.166 - 1.505.213}{1.505.213} \cdot 100\%$$

$$g = \frac{71.953}{1.505.213} \cdot 100\%$$

$$g = 4,78\%$$

b. Pengertian *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

Pada bagian ini kita bahas hubungan antara peningkatan unsur I (investasi) terhadap PDB/PDRB yang dikenal dengan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. Secara definisi, ICOR adalah suatu ukuran yang menunjukkan besarnya tambahan investasi baru yang diperlukan untuk meningkatkan output sebesar satu unit. Sebagai contoh, jika diketahui ICOR = 4,18, menunjukkan bahwa setiap pertambahan PDB sebesar satu unit dibutuhkan tambahan investasi sebesar 4,18 unit. Untuk ini diasumsikan bahwa variabel lain (selain I – investasi) yakni C, G, X, dan M tidak berubah. Dengan

asumsi ini banyak pihak menganggap sebagai kelemahan dari perencanaan pembangunan dengan pendekatan ICOR.

c. Pengertian Investasi

BPS yang mengacu pada konsepsi pendapatan nasional pada *A System of National Account* (UN, 1968), mengemukakan bahwa investasi adalah selisih antara stok kapital pada tahun tertentu (t) dikurangi dengan stok kapital pada tahun sebelumnya (t-1). Dengan demikian maka setiap terjadi penambahan modal dianggap sebagai investasi. Oleh karena itu, besarnya investasi pada tahun tertentu dicerminkan oleh besarnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Dalam pengertian PMTB antara lain meliputi pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan pembelian barang modal baru maupun bekas dari luar negeri. Termasuk di dalam PMTB ini adalah perbaikan besar barang modal yang mengakibatkan bertambahnya umur pemakaian atau meningkatkan kapasitas operasi barang modal tersebut, dikurangi dengan penjualan barang modal yang sudah ada.⁴¹ Untuk memudahkan pemahaman, PMTB ini dapat disamakan dengan "belanja modal" pada anggaran belanja pemerintah. Barang yang dikategorikan sebagai barang modal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁴²

- a. Mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun;
- b. Nilai barang modal relatif besar dibandingkan dengan output yang dihasilkannya secara rutin selama periode tertentu;
- c. Dapat digunakan berulang kali dalam proses produksi.

⁴¹Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, *Incremental Capital Output Ratio DKI Jakarta 1996-1999*, Katalog BPS: 1119.31, h. 7.

⁴² BPS) Provinsi DKI Jakarta, Katalog BPS: 1119.31, hh. 7-8.

Secara lebih rinci, jenis barang modal meliputi:

- 1). Barang modal dalam bentuk bangunan, jalan raya, jembatan, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan irigasi, pelabuhan, dan lain-lain.
- 2). Barang modal dalam bentuk mesin dan peralatan, baik untuk keperluan pabrik, kantor, maupun untuk usaha rumah tangga.
- 3). Alat-alat transportasi.
- 4). Biaya yang dikeluarkan untuk perubahan dan perbaikan barang modal yang dapat meningkatkan produktivitas atau memperpanjang umur pemakaian barang modal tersebut.
- 5). Pengeluaran untuk pengembangan dan pembukaan lahan baru, perluasan hutan, penghutanan kembali, serta penanaman dan peremajaan pohon perkebunan.
- 6). Pembelian ternak produktif untuk keperluan perbaikan, pemerahan susu, pengangkutan, dan sebagainya (tidak termasuk ternak konsumsi)

2. RUMUS ICOR DAN PENERAPANNYA

Secara teoritis, terdapat beberapa rumus yang yang dapat digunakan dalam menghitung ICOR. Masing-masing rumus digunakan untuk tujuan dan asumsi masing-masing pula.⁴³ Dalam modul ini hanya dikemukakan satu rumus saja, yakni:

$$\text{ICOR} = \frac{I}{\Delta Y}$$

Di mana:

ICOR = angka yang menunjukkan besarnya tambahan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan satu unit output pada tahun t

I = Besarnya tambahan investasi pada tahun t

ΔY = Besarnya tambahan output (PDB atau PDRB) pada tahun t

⁴³ Ibid., h.13-16.

Dengan rumus tersebut diasumsikan bahwa investasi yang dilakukan dalam tahun itu langsung dapat menghasilkan PDB/PDRB pada tahun yang bersangkutan.⁴⁴

Contoh Penghitungan:

Misalkan di Provinsi Kalimantan Tengah, PDRB menurut jenis pengeluaran atas dasar harga konstan 2000 tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut:

Tabel-6.2 PDRB MENURUT JENIS PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2005-2006 (RP MILYAR)

Jenis Pengeluaran	2005	2006
Konsumsi Rumah Tangga	7.097	7.430
Konsumsi Pemerintah	2.292	2.463
Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi)	4.850	5.487
Stok Barang Dagangan	1.099	975
Ekspor Barang & Jasa	4.561	5.069
(Impor)	(5.867)	(6.574)
PDRB	14.032	14.850

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah⁴⁵ (istilah jenis pengeluaran disesuaikan)

Berdasarkan data PDRB tersebut dapat diketahui bahwa investasi tahun 2005 sebesar Rp4.850.000.000.000,00 dan tahun 2006 Rp5.487.000.000.000,00. PDRB tahun 2005 sebesar Rp14.032.000.000.000,00 dan tahun 2006 sebesar Rp14.850.000.000.000,00 . Dari data tersebut dapat dicari perubahan masing-masing jenis pengeluaran dan prosentase perubahannya sebagai berikut.

⁴⁴ Op.Cit., h. 13.

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Pendapatan Regional/*Regional Income* <http://kalteng.bps.go.id/regincome.html>

Tabel-6.3 PERUBAHAN PDRB MENURUT JENIS PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2005-2006 (RP MILYAR)

Jenis Pengeluaran	2005 (Rp)	2006 (Rp)	Perubahan 2006 -2005 (Rp)	% tase Perubahan
Konsumsi Rumah Tangga	7.097	7.430	333	4,69
Konsumsi Pemerintah	2.292	2.463	171	7,46
Pembentukan Modal Tetap (Investasi)	4.850	5.487	637	13,13
Penambahan (Penurunan) Stok	1.099	975	-124	-11,28
Ekspor Barang & Jasa	4.561	5.069	508	11,14
(Impor)	(5.867)	(6.574)	-707	12,05
PDRB	14.032	14.850	818	5,83

Dari Tabel-6.3 diketahui bahwa pada tahun 2006 terdapat penambahan investasi sebesar Rp637.000.000.000,00 dibanding tahun 2005 dan PDRB tahun 2006 naik sebesar Rp818.000.000.000,00 dibanding tahun 2005. Atas dasar data ini dapat dihitung ICOR tahun 2006 sebagai berikut:

$$\text{ICOR} = \frac{637}{818} = 0,778729$$

Angka ICOR sebesar 0,778729 menunjukkan bahwa jika ingin meningkatkan PDRB sebesar Rp1.000.000.000,00 diperlukan tambahan investasi sebesar: 0,778729 X Rp1.000.000.000,00 = Rp778.728.606,00.

3. MANFAAT ICOR DALAM PERENCANAAN EKONOMI MAKRO

Perencanaan pembangunan pada dasarnya akan ditentukan oleh kemampuan penyediaan sumber dana, untuk diinvestasikan guna mencapai laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan yang hendak dicapai. Untuk keperluan analisis ini, konsep ICOR dapat dimanfaatkan. ICOR bermanfaat untuk memperkirakan kebutuhan dana, baik untuk perencanaan PDB atau PDRB secara menyeluruh maupun sektoral.

Misalkan, untuk kasus PDRB Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, jika kondisi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah tahun 2006 diperkirakan terjadi juga pada tahun 2007 dan 2008, maka proyeksi PDRB (tanpa perencanaan ICOR) tahun 2007 dan 2008 nampak sebagai berikut.

Tabel-6.4 PROYEKSI PDRB (TANPA PERENCANAAN ICOR) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2007 DAN 2008 (RP MILYAR)

Jenis Pengeluaran	2005 (Rp)	2006 (Rp)	Proyeksi	
			2007(Rp)	2008(Rp)
Konsumsi Rumah Tangga	7.097	7.430	7.778*)	8.143**)
Konsumsi Pemerintah	2.292	2.463	2.647	2.844
Pembentukan Modal Tetap (Investasi)	4.850	5.487	6.207	7.022
Penambahan (Penurunan) Stok	1.099	975	865	767
Ekspor Barang & Jasa	4.561	5.069	5.634	6.261
(Impor)	(5.867)	(6.574)	-7.366	-8.254
PDRB	14.032	14.850	15.765	16.684

Sumber Data: simulasi oleh penulis

Penjelasan perhitungan proyeksi tahun 2007 dan 2008 untuk jenis pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

$$*) \quad 7.430 \cdot \frac{(100 + 4,69)}{100} = 7.778$$

$$**) \quad 7.778 \cdot \frac{(100 + 4,69)}{100} = 8.143$$

Anggaphlah kita sedang berada pada pertengahan tahun 2007, di mana data PDRB tahun 2006 telah diketahui dan PDRB tahun 2007 diproyeksikan seperti nampak pada Tabel-6.3. Misalkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak puas dengan pertumbuhan PDRB tahun 2008 yang hanya 5,83% (lihat Tabel-6.2) dan ingin meningkatkannya menjadi sebesar 10% dibanding proyeksi PDRB tahun 2007. Dengan asumsi pertumbuhan jenis pengeluaran sama dengan yang terjadi pada tahun 2006, maka penambahan PDRB tahun 2008 dapat dihitung sebagai berikut:

- PDRB tanpa tambahan investasi (perhitungan ICOR) : Rp 16.684
- PDRB yang diinginkan: 110% X 16.684: Rp 18.352
- Tambahan PDRB yang diinginkan : Rp 1.668

Dengan tambahan PDRB yang diinginkan sebesar Rp1.668.000.000.000,00 dan ICOR sebesar 0,778729, maka kebutuhan tambahan investasi adalah: $0,778729 \times \text{Rp}1.668.000.000.000,00 = \text{Rp}1.298.000.000.000,00$. Dengan demikian jumlah investasi yang harus ditanamkan di tahun 2008 seluruhnya adalah: $\text{Rp}7.022.000.000.000,00 + \text{Rp}1.298.000.000.000,00 = \text{Rp}8.320.000.000.000,00$. Dengan efek pengganda (*multiplier*) dalam kegiatan ekonomi, diharapkan dalam tahun 2008 itu juga dihasilkan tambahan PDRB sebesar Rp1.668.000.000.000,00 sehingga PDRB secara keseluruhan tahun 2008 menjadi sebesar Rp18.352.000.000.000,00.

Berikut ini disajikan hasil perhitungan ICOR oleh BPS untuk beberapa bidang sebagai berikut:

Tabel-6.5 ICOR MENURUT LAPANGAN USAHA DI DKI JAKARTA TAHUN TAHUN 1996-1999

No	Lapangan Usaha	ICOR
1	Pertanian	6,57
2	Industri Pengolahan	0,48
3	Listrik, gas, air bersih	10,07
4	Bangunan	0,73
5	Perdagangan, hotel, restoran	4,29
6	Pengangkutan dan komunikasi	1,60
7	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	0,04
8	Jasa-jasa	2,92
9	Jasa Pemerintahan	7,01
10	Jasa Pemerintahan Lainnya	1,23
	Total	1,86

Sumber Data: BPS, *Incremental Capital Output Ratio* DKI Jakarta 1996-1999

Daftar ICOR untuk industri pengolahan nasional menurut jenis industri tahun 1980-1990 adalah sebagai berikut.

**Tabel-6.6 ICOR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN NASIONAL
MENURUT JENIS INDUSTRI TAHUN 1980-1990**

No	Jenis Industri	ICOR
1	Industri Makanan	1,86
2	Industri Tekstil	4,58
3	Industri Kayu	5,22
4	Industri Kertas	5,68
5	Industri Kimia	4,62
6	Industri Galian Non Logam	6,87
7	Industri Logam Dasar	3,83
8	Industri Barang Dari Logam	3,17
9	Industri Pengolahan Lain	2,85
	Total	4,18

Sumber : BPS, *Incremental Capital Output Ratio* Sektor Industri, 1980-1990

4. MEMAHAMI ICOR

Berdasar pengertian ICOR dapat diketahui bahwa semakin kecil angka ICOR berarti investasi yang dilakukan semakin efisien. Misalnya untuk investasi pada tahun dan kondisi yang sama, di Kabupaten Baros ICOR = 5, sedangkan di Kabupaten Bagindo ICOR = 7. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Baros, untuk mendapatkan tambahan PDB Rp1,00 diperlukan tambahan investasi sebesar Rp5,00. Sedangkan di Kabupaten Bagindo diperlukan tambahan investasi sebesar Rp7,00. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa untuk melakukan investasi, kondisi perekonomian di Kabupaten Baros lebih kondusif dan lebih efisien dibandingkan dengan di Kabupaten Bagindo.

Hal-hal yang mempengaruhi besar-kecilnya ICOR ialah sebagai berikut:

a. Bentuk Investasi

Untuk investasi yang bersifat padat karya yang kurang memerlukan banyak modal, ICOR-nya relatif lebih rendah. Di lain pihak, investasi yang bersifat padat modal yang banyak memerlukan modal, ICOR-nya lebih besar.

b. Umur Ekonomi Investasi

Untuk investasi yang masa manfaatnya panjang biasanya memerlukan jumlah modal yang diinvestasikan juga besar. Dengan demikian karena masa pengembalian modalnya memerlukan waktu yang panjang, maka ICOR akan semakin besar. Sebaliknya untuk investasi yang masa manfaatnya pendek ICOR-nya akan kecil pula.

c. Pemanfaatan Kapasitas Produksi

Untuk investasi yang pemanfaatan kapasitas produksinya rendah, berarti terdapat kapasitas yang menganggur, maka dengan jumlah investasi yang besar hanya diperoleh output yang kecil. Hal ini berdampak pada ICOR yang besar. Sedangkan untuk investasi yang beroperasi secara penuh yang berarti tidak ada barang modal yang menganggur, ICOR-nya lebih rendah.

d. Ekonomi Biaya Tinggi

Bentuk ekonomi biaya tinggi ini antara lain adalah: budaya kerja yang boros, prosedur kerja yang berbelit-belit, pungutan liar yang membebani perusahaan, kerusakan sarana transportasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mendorong efisiensi investasi, diperlukan tekad yang kuat bagi pemerintah untuk menghilangkan atau meminimalkan ekonomi biaya tinggi tersebut. Pungutan liar akan menjadikan investasi semakin mahal sehingga untuk menghasilkan tambahan output (PDB) Rp1,00 investor harus mengeluarkan uang lebih banyak. Untuk dapat menarik minat investasi ke suatu daerah, maka pemerintah daerah harus bersaing dengan daerah lain dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. Pelayanan tersebut antara lain dengan mempermudah proses perizinan, menghilangkan pungutan-pungutan, menjaga stabilitas keamanan, adanya kepastian hukum, dan lain sebagainya.

5. LATIHAN

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan ICOR.
- 3) Jelaskan apa yang dimaksud dengan investasi dalam pembahasan ekonomi makro.
- 4) Jelaskan apa peran ICOR dalam perencanaan ekonomi makro.
- 5) Jelaskan apa yang dimaksud angka-angka ICOR pada Tabel 6-5 di atas
- 6) Jelaskan penyebab besar atau kecilnya ICOR.
- 7) Berdasarkan data pada Tabel-3, hitung pertumbuhan ekonomi tahun 2006 menurut lapangan usaha
- 8) Berdasarkan Tabel-10, jelaskan apa arti ICOR pada masing-masing jenis industri yang bersangkutan.

BAB VII DISTRIBUSI PENDAPATAN

Tujuan Pemelajaran

Setelah mempelajari bab ini diharapkan para peserta memahami pengertian distribusi pendapatan dan mampu menafsirkan Rasio Gini dan memanfaatkannya dalam pelaksanaan audit.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia lebih banyak diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan unsur pemerataannya masih kurang mendapatkan perhatian. Alhasil lahirlah kesenjangan ekonomi, di mana segelintir orang hidup dalam berkelimpahan, namun sebagian masyarakat lainnya hidup dalam keadaan memprihatinkan. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebenarnya, pemerataan pendapatan telah ditetapkan sebagai salah satu unsur dari trilogi pembangunan kita, yakni: (1) pertumbuhan ekonomi, (2) pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan (3) stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Pada bab ini dibahas distribusi pendapatan, pengukuran pemerataan distribusi pendapatan, penyebab terjadinya ketimpangan, dan cara penanggulangan ketimpangannya.

Tujuan pembahasan distribusi pendapatan adalah mengukur seberapa baik pembagian pendapatan nasional terhadap warga negaranya. Perlu diketahui bahwa besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tidak memberikan gambaran bahwa seluruh penduduk yang ada di negara tersebut meningkat kesejahteraannya. Sangat mungkin terjadi, ekonomi meningkat pesat tetapi jumlah penduduk miskin juga meningkat. Hal ini tergantung pada tingkat pemerataan distribusi pendapatan tersebut. Jika distribusinya baik, maka pertumbuhan dapat dinikmati oleh penduduk pada umumnya, namun jika

pemerataannya tidak baik, pertumbuhan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, oleh sekelompok orang berpenghasilan tinggi saja.

Distribusi pendapatan berbeda dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata per orang selama periode tertentu (lazimnya tiap tahun). Angka pendapatan rata-rata diperoleh dengan cara membagi seluruh pendapatan nasional dengan jumlah penduduknya. Sedangkan distribusi pendapatan berkaitan dengan seberapa baik tingkat pemerataan pembagian pendapatan nasional yang diperoleh selama periode tertentu (setahun). Untuk memudahkan pemahaman, kita berikan ilustrasi berikut ini. Misalkan di dalam satu keluarga ada lima orang, yakni A, B, C, D, dan E yang bekerja pada bidang yang berbeda-beda. Kelima orang tersebut setiap bulannya memperoleh penghasilan masing-masing (dalam rupiah) sebagai berikut: A: Rp300.000,00 B: Rp320.000,00 C: Rp350.000,00 D: Rp500.000,00 E: Rp3.500.000,00 sehingga jumlah semuanya Rp4.970.000,00.

Dari data tersebut dapat dihitung pendapatan per kapitanya adalah: $Rp4.970.000,00 : 5 = Rp994.000,00/bulan$. Dari pendapatan perkapita tersebut terkesan bahwa seluruh orang di dalam keluarga pendapatannya cukup tinggi. Namun kondisi sebenarnya tidak seperti kesan yang ada, karena empat orang (A, B, C, dan D) pendapatannya di bawah rata-rata, atau kurang dari Rp994.000,00. Bahkan rentang pendapatan dari yang terendah (Rp300.000,00) dengan yang tertinggi (Rp3.500.000,00) sangat tinggi, yakni Rp2.200.000,00. Hanya satu orang yang pendapatannya di atas rata-rata, yakni si E. Satu orang terkaya dari lima orang tersebut menguasai 70,4% dari total pendapatan. Sebaliknya, empat orang lainnya hanya menguasai 29,6% dari total pendapatan. Bandingkan jika kondisi pendapatan lima orang tersebut sebagai berikut: A: Rp730.000,00; B: Rp780.000,00; C: Rp960.000,00 D: Rp1.100.000,00 dan E: Rp1.400.000,00.

Dengan total pendapatan yang sama, yakni Rp4.970.000,00 dan rata-rata yang sama pula Rp994.000,00/bulan, namun pemerataannya jauh lebih baik.

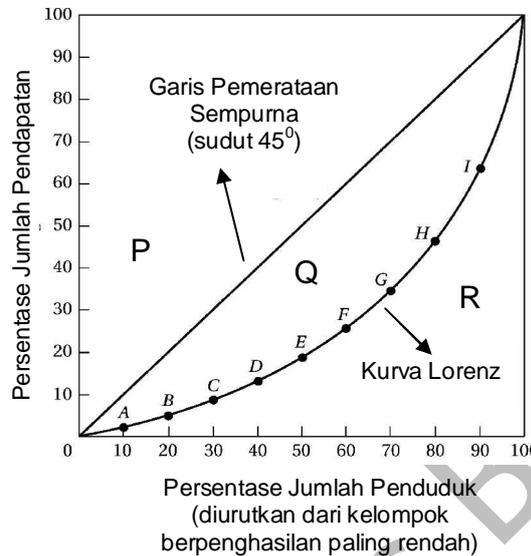
Pada contoh kedua ini rentang pendapatan dari yang terendah (Rp730.000,00) dengan yang tertinggi (Rp1.400.000,00) hanya Rp670.000,00. Satu orang terkaya dari lima orang tersebut hanya menguasai 28,1% dari total pendapatan, sedangkan empat orang lainnya menguasai 71,9% dari total pendapatan.

2. PENGUKURAN PEMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan “Rasio Konsentrasi Gini” (*Gini Concentration Ratio*) atau lebih sering disebut dengan Koefisien Gini. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi 5 atau 10 kelompok (*quintiles* atau *deciles*) sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).⁴⁶ Koefisien Gini dapat digambarkan dengan Kurva Lorenz seperti nampak pada Gambar-7.1 berikut ini:

⁴⁶An-Naf, Julissar, *Pengentasan Kemiskinan Sebagai Sasaran Strategis Dalam Pembangunan Di Indonesia*, <http://julissarwriting.blogspot.com/2007/11/pengentasan-kemiskinan.html>

Gambar-7.1 KURVA LORENZ



Keterangan Gambar:

Sumbu horisontal menyatakan jumlah penduduk dalam persentase kumulatif. Dari kiri ke kanan menunjukkan jumlah penduduk dengan urutan pendapatan paling rendah. Pada titik A menunjukkan kelompok pertama sebanyak 10% berpendapatan terendah. Titik B adalah kelompok kedua sebanyak 20% berpendapatan terendah, dan seterusnya hingga titik I adalah menggambarkan 90% berpendapatan terendah. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok penduduk yang disebutkan pada sumbu horisontal. Garis diagonal adalah garis dengan sudut 45° , menunjukkan garis pemerataan sempurna. Kurva Lorenz menunjukkan tingkat distribusi yang sebenarnya terjadi.

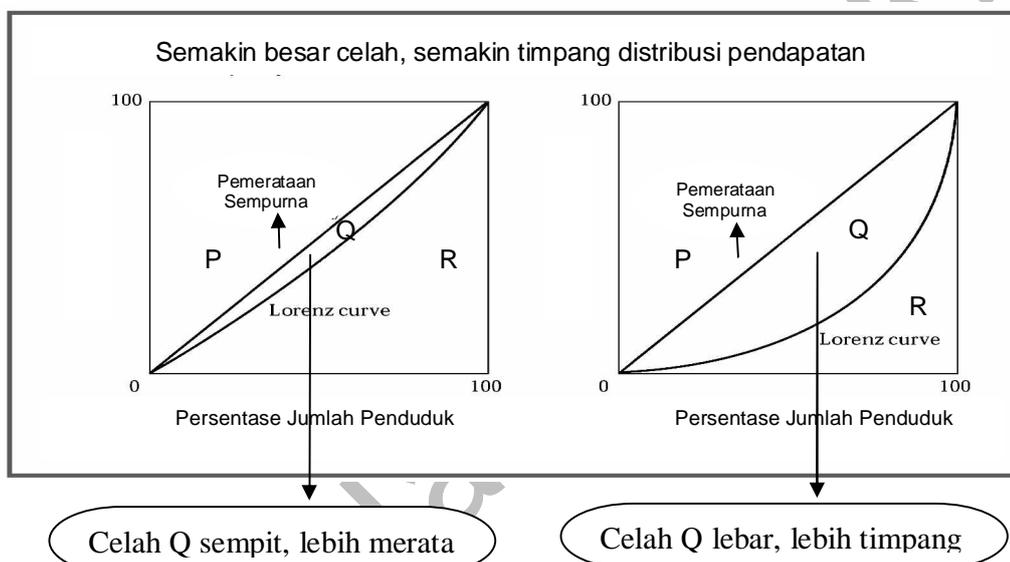
Tingkat ketimpangan distribusi nampak dari besar/kecilnya wilayah Q, sebagai celah antara garis diagonal yang menunjukkan pemerataan sempurna dengan Kurva Lorenz sebagai distribusi yang sesungguhnya. Semakin besar celah (wilayah Q), semakin timpang tingkat pemerataan dalam distribusi pendapatan.

Misalnya, titik D pada Kurva Lorenz, untuk 40% dari jumlah penduduk (sumbu horisontal) berpenghasilan terendah menerima pendapatan kira-kira sebanyak 18% dari total pendapatan nasional. Pada titik H, 80% penduduk berpenghasilan terendah menerima pendapatan kira-kira sebanyak 50% dari total pendapatan nasional.

Besar-kecilnya celah Q pada umumnya dinyatakan dalam bentuk Indeks Gini yang perhitungannya dilakukan melalui rumus matematis. Untuk menghindari kesulitan matematis, di sini hanya disampaikan prinsip dasar dari perhitungan Indeks Gini yang dapat diketahui melalui indikasi sbb:

Secara visual, tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan ini dapat dilihat pada Gambar-7.2 berikut ini.

Gambar-7.2 Kurva Lorenz: PERBEDAAN TINGKAT KETIDAKMERATAAN



Secara sederhana, Koefisien Gini dapat juga dicari dengan perbandingan sebagai berikut:

$$KG = \frac{\text{wilayah } Q}{\text{luas wilayah } (Q + R)}$$

Memperhatikan rumus atau perbandingan tersebut dapat dinyatakan bahwa semakin sempit wilayah Q akan semakin kecil KG (Koefisien Gini). Semakin kecil wilayah Q hingga mendekati nol ($Q \approx 0$), maka pembilang adalah nol, sedang penyebutnya (wilayah $Q + R$) adalah bidang seluas segitiga di bawah garis pemerataan sempurna, atau:

$$KG = \frac{\text{wilayah}Q}{\text{luaswilayah}(Q + R)} = \frac{0}{\text{wil}(0 + R)} = 0$$

Koefisien Gini = 0 atau mendekati 0 menunjukkan pemerataan secara sempurna dalam distribusi pendapatan.

Sebaliknya, semakin luas wilayah Q, KG-nya akan mendekati 1. Jika wilayah Q sangat luas, maka wilayah R semakin kecil karena terdesak oleh wilayah Q sehingga luas wilayah R mendekati nol ($R \approx 0$). Dengan demikian antara pembilang dan penyebutnya sama, yakni seluas segitiga di bawah garis pemerataan sempurna, maka:

$$KG = \frac{\text{wilayah}Q}{\text{luaswilayah}(Q + R)} = \frac{\text{wil}Q}{\text{wil}(Q + 0)} = \frac{Q}{Q} = 1$$

Koefisien Gini = 1 atau mendekati 1 menunjukkan adanya ketimpangan sempurna dalam distribusi pendapatan.

Dari uraian tentang Indeks Gini dapat ditarik simpulan bahwa semakin besar indeksnya, yakni mendekati 1, berarti pemerataan semakin buruk, dan sebaliknya semakin kecil indeksnya, yakni mendekati 0, pemerataan semakin baik atau semakin merata.

Di Indonesia, penghitungan Koefisien/Indeks Gini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sayang sekali, BPS tidak menghitung Indeks Gini atas pendapatan, melainkan atas dasar pengeluaran belanja masyarakat. Dalam penghitungan Indeks Gini Belanja tersebut, BPS mengadopsi konsep yang diterapkan oleh Bank Dunia. Untuk itu penduduk digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ukuran ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia dilihat dari besarnya persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan rendah yang dapat disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Golongan I	Pendapatan nasional yang diterima	Kategori tingkat ketimpangan
40% penduduk berpenghasilan rendah	< 12%	tinggi
	12% - 17%	sedang
	>17%	rendah

3. KONDISI DISTRIBUSI PENGELUARAN (BELANJA) DI INDONESIA

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa BPS tidak menyediakan data Indeks Gini Pendapatan, sehingga yang dapat disajikan di sini hanya Indeks Gini Pengeluaran masyarakat untuk tahun 2004, 2005, dan 2006 berikut ini.

Tabel-7.1 DISTRIBUSI PENGELUARAN PER KAPITA DAN INDEKS GINI, 2004-2006 DI INDONESIA

TAHUN	40% TERENDAH	40% MENENGAH	40% TERTINGGI	INDEKS GINI
2004	20,80	37,13	42,07	0,32
2005	20,22	37,69	42,09	0,33
2006	19,75	38,10	42,15	0,33

Sumber Data: BPS⁴⁷

Berdasarkan kriteria tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tersebut di atas, diketahui bahwa 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah masih memperoleh bagian lebih dari 17% total belanja masyarakat. Porsi terendah dari kelompok ini terjadi pada tahun 2006 yakni sebesar 19,75% menunjukkan bahwa tahun 2006 merupakan tahun distribusi paling buruk di Indonesia. Namun demikian karena porsi yang distribusi yang berada di atas 17%, maka tingkat ketimpangan distribusi di Indonesia masih termasuk kategori rendah. Demikian pula Indeks Gini yang

⁴⁷ Indikator Kesejahteraan Rakyat 2006, Katalog 4103, h. 45.

berkisar pada 0,32 hingga 0,33 yang berarti masih lebih dekat ke 0 (nol), maka pemerataan distribusi belanja di Indonesia masih tergolong baik.

Distribusi belanja di Indonesia tersebut ternyata masih lebih baik dibandingkan dengan distribusi pendapatan di Amerika Serikat yang Indeks Gininya sebagai berikut.

Tabel-7.2 INDEKS GINI AMERIKA SERIKAT DARI TAHUN KE TAHUN

Tahun	Indeks Gini
1967	0,397
1968	0,386
1970	0,394
1980	0,403
1990	0,428
2000	0,462
2005	0,469

Sumber Data: Biro Sensus Amerika Serikat⁴⁸

Berdasarkan pemeringkatan dari Bank Dunia (*World Development Indicator* 2002), tingkat pemerataan yang tinggi di Indonesia tersebut membawa Indonesia ke dalam 30 negara yang paling merata di dunia. Dengan angka koefisien Gini sebesar 0,32 (peringkat ke 26), Indonesia sejajar dengan negara-negara bekas komunis (seperti Slowakia, Belarusia, dan Hongaria), negara-negara Skandinavia (Denmark, Swedia), atau negara-negara yang menerapkan sistem *welfare-state* (Belanda, Belgia). Rendahnya ketimpangan di negara-negara tersebut tentunya terkait dengan desain sistem ekonominya. Namun demikian, baiknya distribusi pendapatan di Indonesia tersebut ternyata dipertanyakan berbagai pihak yang menyangsikan keakuratan datanya.⁴⁹ Alasan yang dikemukakan adalah, adanya studi empiris kurva Lorenz di negara

⁴⁸ Wikipedia, *Gini Coefficient*, http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient

⁴⁹ Yusuf, Arief Anshory, *Mengkaji Lagi Ketimpangan di Indonesia*, <http://love-indonesia.blogspot.com/2006/09/mengkaji-lagi-ketimpangan-di-indonesia.html>

berkembang termasuk Indonesia, pada umumnya semakin menjauh dibandingkan dengan negara maju. Dilihat dari koefisien gini, negara maju umumnya mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan negara berkembang.⁵⁰ Menurut penulis, salah satu penyebab kecurigaan akurasi data adalah, Indeks Gini Indonesia berbasis pengeluaran belanja masyarakat, sedangkan di negara lain berbasis pendapatan. Dengan demikian Indeks Gini tidak menggambarkan tingkat distribusi pendapatan, melainkan tingkat belanja. Padahal dari Bab V diketahui bahwa unsur belanja atau konsumsi hanya merupakan bagian kecil dari pendapatan yang dinyatakan dalam PDB.

Laporan *Asian Development Bank* mengungkapkan, di kawasan Asia sedang berkembang fenomena bahwa orang kaya lebih cepat menjadi kaya. Dalam laporan yang dipublikasikan di www.adb.org. juga terungkap, ketimpangan yang semakin melebar dalam standar hidup dapat mengancam proses pertumbuhan, sekalipun data statistik menunjukkan angka kemiskinan sedang menurun. Publikasi statistik tahunan dari ADB, mengatakan bahwa perkembangan jumlah kaum miskin di kawasan Asia cukup cepat.⁵¹

Data Survey Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) BPS tahun 1999 menunjukkan bahwa 61,1% produksi nasional dihasilkan oleh hanya 0,2% (66 ribu perusahaan) dari seluruh perusahaan nasional, sedangkan produksi nasional selebihnya yang 38,9% dihasilkan oleh sekitar 33,4 juta perusahaan atau 98,8 % dari jumlah perusahaan yang ada di Indonesia.⁵²

⁵⁰ Sofa, *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*, <http://massofa.wordpress.com/2008/02/16/ekonomi-pembangunan-dan-pembangunan-ekonomi/>

⁵¹ Orang Kaya Lebih Cepat Kaya Dibandingkan Orang Miskin di Asia 2008-03-13 09:44:30
<http://www.adb.org/media/Articles/2007/12077-asian-developments-reports/>

⁵² Ikhsan, Mohamad, *Deregulasi Ekonomi, Kemiskinan, dan Distribusi Pendapatan*. <http://bakti.easternindonesia.org/gsd/collect/pdf/index/assoc/HASH018e/9cfe51f4.dir/doc.pdf>

4. KEMISKINAN DI INDONESIA

Membahas ketimpangan distribusi pendapatan tidak dapat dilepaskan dengan masalah kemiskinan. Ketimpangan distribusi yang ekstrim menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara kelompok kaya dan miskin. Kelompok kaya menerima bagian yang sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok miskin. Di Indonesia, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi. Di bawah ini dibahas tentang kemiskinan di Indonesia.

a. Pengertian Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan. Batas kecukupan makanan (pangan) didasarkan pada besarnya pengeluaran uang untuk memenuhi kebutuhan minimum energi 2.100 kalori perkapita perhari. Kebutuhan energi tersebut didasarkan pada 52 komoditas makanan terpilih sesuai dengan pola konsumsi penduduk. Sedangkan batas kecukupan nonpangan dihitung dari besarnya uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain.⁵³ Dalam membahas kemiskinan di Indonesia, BPS menetapkan batas pendapatan minimum per kapita untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ BPS, Jakarta-Indonesia. *Data Informasi Kemiskinan Tahun 2003*, Katalog BPS: 2331 (Jakarta: VC Nasional, 2003), hh.2-3.

⁵⁴ BPS, Jakarta-Indonesia. *Statistik Indonesia 2002*, Katalog BPS: 1401 (Jakarta: BPS, 2002), h. 578

**Tabel-7.3 BATAS PENGELUARAN MINIMUM
UNTUK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN
DASAR**

Tahun	Pengeluaran/kapita/bulan	
	Kota (Rp)	Desa (Rp)
1996	42.032	31.366
1998	96.959	72.780
1999	92.409	74.272
2000	91.632	73.648
2001	100.011	80.382
2002	130.499	96.512
2003	138.803	105.888
2004	143.455	108.725
2005	150.799	117.259
2006	174.290	131.256

Sumber Data: BPS⁵⁵

Ginanjart Kartasmita (1999) menyatakan bahwa seseorang disebut miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, yakni kebutuhan hidup minimum.⁵⁶

b. Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan kriteria batas pengeluaran minimum sebagaimana Tabel-7.5 di atas, BPS menyajikan data jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagai berikut:

⁵⁵ *Statistik Indonesia*, Tabel 12.1.B

⁵⁶ Entang Sastraatmadja, *Anatomi dan Suara Kemiskinan*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1103/17/0802.htm>

Tabel-7.4 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)		
	Kota	Desa	Jumlah
1996	9,6	24,9	34,5
1998	17,6	31,9	49,5
1999	15,7	32,7	48,4
2000	12,3	26,4	38,7
2001	8,6	29,3	37,9
2002	13,3	25,1	38,4
2003	12,2	25,1	37,3
2004	11,4	24,8	36,1
2005	12,4	22,7	35,1
2006	14,5	24,8	39,3

Sumber Data: BPS⁵⁷

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam persentase adalah sebagai berikut:

Tabel-7.5 PERKEMBANGAN PROSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA

Tahun	Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Jumlah
1996	13,6	19,9	17,7
1998	21,6	25,7	24,5
1999	19,5	26,1	23,5
2000	14,6	22,4	19,1
2001	9,8	24,8	18,4
2002	14,5	21,1	18,2
2003	13,6	20,2	17,4
2004	12,13	20,11	16,66
2005	11,68	19,98	15,97
2006	13,47	21,81	17,75

Sumber Data: BPS⁵⁸⁵⁷ Statistik Indonesia, Tabel 12.1.A⁵⁸ Statistik Indonesia, Tabel 12.1.B

Berdasarkan Tabel-7.4 dan Tabel-7.5 diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia relatif masih sangat tinggi. Secara total jumlahnya masih berkisar pada angka 40 juta orang atau sekitar 20% dari jumlah penduduk yang pada tahun 2006 yang mencapai jumlah 222,19 juta orang. Peta kemiskinan dapat dilihat pada komposisi daerah pedesaan dan perkotaan. Tabel-7.5 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di daerah pedesaan tahun 2006 sebanyak 21,81% (dari jumlah penduduk di pedesaan), jauh lebih besar dibandingkan dengan di daerah perkotaan yang hanya sekitar 13,47%. Hal ini dapat dilihat dari besarnya arus urbanisasi, karena di pedesaan relatif lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan di perkotaan.

Tren kondisi kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa secara absolut jumlahnya meningkat pada saat krisis ekonomi, yaitu dari 34,5 juta orang pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta orang pada tahun 1998 dan menurun lagi menjadi 30,3 juta pada tahun 2006. Secara relatif juga hampir tidak ada perbedaan, yaitu secara total sebesar 17,7% pada tahun 1996 menjadi 24,5% pada tahun 1998 dan menurun lagi menjadi 17,75% pada tahun 2006.

Krisis telah memperburuk harkat kemanusiaan dengan meningkatkan jumlah penduduk miskin, terutama melalui kenaikan harga-harga secara mendadak dan nilai rupiah terdepresiasi sangat cepat. Kenaikan harga-harga, khususnya harga barang-barang impor menyebabkan tekanan sektor riil. Akibatnya, tekanan pada kesempatan kerja, permintaan atas barang-barang dan jasa-jasa melemah, selanjutnya sektor industri mengurangi produksi sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Tingkat produksi serta pendapatan dari pertanian di pedesaan cenderung menurun.

c. Implikasi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Masyarakat miskin tidak saja rendah dari segi pendapatan dan tingkat konsumsinya, tetapi juga rendah tingkat pendidikan dan kesehatannya, tidak berdaya untuk berpartisipasi dalam

pembangunan, rendah pergaulan sosialnya, dan berbagai masalah kekurangan lainnya.⁵⁹ Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap keadaan gizi terutama anak balita, ibu hamil dan menyusui.

Todaro (1989) dan Komaruddin (1991) mengatakan bahwa kemiskinan berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemiskinan dapat dikaitkan dengan kekurangan modal, kekurangan gizi, perumahan yang tidak sehat, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, dan pendapatan yang rendah.⁶⁰

Sementara di beberapa kasus, seperti ditemukan Irawan (1998), penurunan pendapatan secara tajam menyebabkan banyak rumah tangga menjadi sangat nestapa. Mereka mengalami kesulitan untuk membeli makanan. Penurunan ini umumnya mengakibatkan berubahnya pola pengeluaran konsumsi dengan proporsi lebih besar, untuk kebutuhan makanan dibandingkan untuk kebutuhan bukan makanan, seperti untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pada studi lainnya, Irawan (1999) juga menemukan bahwa mayoritas penduduk pedesaan cenderung merubah pola konsumsi makanan, baik kualitas maupun kuantitas, seperti dari nasi ke jagung atau umbi-umbian, dari sebanyak 3 kali ke 1 atau 2 kali makan sehari.⁶¹

Menjadi tugas negara untuk mengentaskan kemiskinan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tugas negara antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

⁵⁹Hendriwan, *Penanggulangan Kemiskinan dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi*, http://rudycr.tripod.com/sem1_023/hendriwan.htm

⁶⁰Insukindro, *Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta 1984 – 1987*, *Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada*, <http://202.159.18.43/jsi/2Ich.htm>

⁶¹Yuliana, *Kaitan Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Status Gizi*, http://rudycr.tripod.com/sem2_023/yuliana.htm

5. PENYEBAB TERJADINYA KETIMPANGAN

Menurut McConnell, Campbell R. dan Brue Stanley L., ketimpangan dalam distribusi pendapatan, antara lain terjadi karena adanya: (1) Perbedaan kemampuan; (2) Pendidikan dan pelatihan; (3) Diskriminasi; (4) Selera dan risiko kerja; (5) Distribusi penguasaan aset sebagai faktor produksi; (6) Kekuatan pasar; dan (7) Keberuntungan, KKN, (8), dsb.⁶² Penyebab lain dari ketimpangan adalah: pertumbuhan ekonomi yang lebih menguntungkan pada sekelompok masyarakat pengusaha besar, pengangguran, dan kebodohan. Sebagai gambaran tentang penyebab ketimpangan adalah penguasaan faktor produksi, di mana usaha kecil sangat sulit mendapatkan kredit perbankan di Indonesia. Tentang pengangguran dapat dikemukakan bahwa berdasarkan Sakernas BPS tahun 2005, jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,8 juta orang. Dilihat dari latar belakang pendidikannya: 31% berpendidikan SD ke bawah; 25% berpendidikan SLTP; 36% berpendidikan SLTA; dan 7% berpendidikan perguruan tinggi.⁶³

Paling tidak terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertama, jumlah pencari kerja lebih besar daripada jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kedua, kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja, dan ketiga, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan efisiensi, kebangkrutan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dari ketiga faktor tersebut, faktor pertama dan kedua merupakan faktor dominan yang menyebabkan pengangguran.

⁶²McConnell, Campbell R. dan Brue Stanley L, hal.683-684.

⁶³ Balai Pengembangan Pendidikan Luar dan Pemuda Regional 3 Semarang, *Pedoman Pemberian Subsidi Kursus Para Profesi (KPP) 2008*, <http://www.bpplsp-jateng.com/e-learning/naskahdetail.php?id=17>

6. PENANGGULANGAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Menurut Todaro (1995: pp 174-175) usaha-usaha memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dapat ditempuh melalui campur tangan pemerintah yang meliputi:

- 1) Mengubah distribusi pendapatan secara fungsional melalui pola kebijakan untuk mengubah harga-harga faktor secara positif. Misalnya meningkatkan gaji pegawai negeri, menetapkan upah minimum bagi para pekerja (buruh), kemudahan investasi, keringanan pajak, subsidi bunga, keringanan bea masuk, dan sebagainya.
- 2) Mengubah distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif pemilikan harta seperti memprioritaskan kredit komersil maupun bersubsidi bagi pengusaha kecil, memberi kesempatan kepada para pekerja untuk turut memiliki saham pada perusahaan, serta pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi, dan lain sebagainya.
- 3) Mengubah distribusi pendapatan golongan atas melalui pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif. Dalam hal ini beban pajak dibuat sedemikian rupa sehingga beban yang lebih berat akan dikenakan pada golongan yang berpenghasilan tinggi.
- 4) Mengubah distribusi pendapatan golongan lemah melalui pembayaran tunjangan dan penyediaan barang dan jasa pemerintah. Misalnya, proyek-proyek kesehatan masyarakat di desa-desa dan di daerah-daerah pinggiran kota, pemberian makan siang bagi anak-anak sekolah, perbaikan gizi anak-anak balita, pemberian air bersih serta listrik di pedesaan, tunjangan dan subsidi pangan bagi daerah-daerah pinggiran kota dan pedesaan yang miskin.⁶⁴

⁶⁴ An-Naf, Julissar, *Pengentasan Kemiskinan sebagai Sasaran Strategis dalam Pembangunan di Indonesia*, <http://julissarwriting.blogspot.com/2007/11/pengentasan-kemiskinan.html>

- 5) Memberikan pelatihan teknis kepada lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan. Dengan pelatihan ini diharapkan mereka akan segera terserap ke dunia kerja. Jika memungkinkan, mereka dapat menciptakan pekerjaan sendiri dan memberikan lapangan kerja bagi orang lain.

Pusdiklatwas BPKP

7. LATIHAN

- 1) Jelaskan apa tujuan kita melakukan pembahasan distribusi pendapatan dan apa metode yang dapat digunakan dalam mengetahui distribusi pendapatan di suatu negara merata atau tidak.
- 2) Indeks Gini berkisar antara nol hingga satu. Jelaskan apa implikasi dari angka-angka tersebut.
- 3) Jika diketahui porsi pendapatan 40% penduduk berpenghasilan terendah dan angka Indeks Gininya pada tahun tertentu nampak sebagai berikut:

TAHUN	40% TERENDAH	INDEKS GINI
2004	20,80	0,32
2005	20,22	0,33
2006	19,75	0,33

Jelaskan apa arti angka-angka tersebut, dan simpulkan kondisi pemerataan pendapatan yang ada.

- 4) Apakah Indeks Gini yang didasarkan pada pengeluaran masyarakat dapat disamakan dengan Indeks Gini yang didasarkan pada pendapatan masyarakat? Berikan penjelasan dan argumentasinya.
- 5) Menurut Todaro, pelatihan teknis kepada lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan dapat menjadi salah satu cara, untuk menghilangkan ketimpangan distribusi pendapatan. Jelaskan apa maksud pernyataan Todaro tersebut dan apakah secara logika pernyataan tersebut dapat diterima, berikan argumentasi Saudara.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Naf, Julissar, *Pengentasan Kemiskinan sebagai Sasaran Strategis dalam Pembangunan di Indonesia*, <http://julissarwritting.blogspot.com/2007/11/pengentasan-kemiskinan.html>
- Balai Pengembangan Pendidikan Luar dan Pemuda Regional 3 Semarang, *Pedoman Pemberian Subsidi Kursus Para Profesi (KPP) 2008*, <http://www.bpplsp-jateng.com/e-learning/naskahdetail.php?id=17>
- Bappenas, *Kerangka Ekonomi Makro Dan Pembiayaan Pembangunan (2005)*, <http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress&view=6/02%20%20Kerangka%20Ekonomi%20Makro1a.pdf>
- BPS, *Data Informasi Kemiskinan Tahun 2003*, Jakarta-Indonesia. Katalog BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2006*, No. Katalog BPS: 4103
- BPS: 2331 (Jakarta: VC Nasional, 2003).
- BPS Provinsi DKI Jakarta, *Incremental Capital Output Ratio DKI Jakarta 1996-1999*, Katalog BPS: 1119.31.
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah, *Pendapatan Regional/Regional Income* <http://kalteng.bps.go.id/regincome.html>
- BPS, *Statistik Indonesia 2002*, Jakarta-Indonesia. Katalog BPS: 1401 (Jakarta: BPS, 2002).
- BPS, *Statistik Indonesia 2007*
- Entang Sastraatmadja, *Anatomi dan Suara Kemiskinan*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1103/17/0802.htm>
- Gordon, Sanford D. dan Dawson, George G., *Introductory Economics*, edisi ke-7 (Toronto: D.C. Heath and Company, 1991).
- Griffin R dan Ronald Elbert. 2006. Business. New Jersey: Pearson Education
- Gwartney, James D. dan Stroup, Richard L., *Macroeconomics: Private and Public Choice*, edisi ke-6 (Tokyo: The Dryden Press, 1977).

- Hendriwan, *Penanggulangan Kemiskinan dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi*, http://rudyc.t.tripod.com/sem1_023/hendriwan.htm
- Herbert A. Simon, *Administrative Behavior*, edisi ke-4 (Singapore: The Free Press, 1997).
- Ikhsan, Mohamad, *Deregulasi Ekonomi, Kemiskinan, dan Distribusi Pendapatan*.<http://bakti.easternindonesia.org/gsd/collect/pdf/index/assoc/HASH018e/9cfe51f4.dir/doc.pdf>
- Insukindro, *Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta 1984 – 1987*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, <http://202.159.18.43/jsi/2lch.htm>
- Jujun S. Suriasumantri, *Berpikir Sistem: Konsep, Penerapan, Teknologi, dan Strategi Implementasi* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta).
- Kapanlagi.com, *Peringkat Korupsi Indonesia Se-Asia Turun*, <http://www.kapanlagi.com/h/0000176955.html>.
- Lipsey, Richard G. dan Steiner, Peter O., *Economics*, edisi ke-6 (New York: Harper International Edition, 1981).
- McConnell, Campbell R. dan Brue Stanley L., *Economics-Principles, Problems, and Policies*, edisi ke-13 (New York: McGraw-Hill, Inc., 1996).
- Meneg PPN/KepalaBappenas Paskah Suzetta, *Pertumbuhan Ekonomi 1% Dipatok Serap 400.000 Naker*, <http://plinplan.com/bisnis/keuangan/22601/2008/03/26/pertumbuhan-ekonomi-1-dipatok-serap-400000-naker/>
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D., *Economics*, edisi ke-11 (New York: McGraw-Hill Book Company, 1985).
- Schiller, Bradley R., *The Economy Today*, edisi ke-2 (New York: Random House, 1983).
- Sofa, *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*, <http://massofa.wordpress.com/2008/02/16/ekonomi-pembangunan-dan-pembangunan-ekonomi/>
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1981)
- Walton M. Gary dan Frank C. Wykoff, *Understanding Economics Today*, edisi ke-3 (Boston: Richard D. Irwin, Inc., 1991).

- Wikipedia, *Gini Coefficient*, http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient
- Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, Sistem Perekonomian*, http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- Yuliana, *Kaitan Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Status Gizi*, http://rudycr.tripod.com/sem2_023/yuliana.htm
- Yusuf, Arief Anshory, *Mengkaji Lagi Ketimpangan di Indonesia*, <http://love-indonesia.blogspot.com/2006/09/mengkaji-lagi-ketimpangan-di-indonesia.html>.

**Lampiran-1 PDB PENDEKATAN PENGELUARAN ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN
(MILYAR RUPIAH)**

JENIS PENGELUARAN		TAHUN				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.231.964	1.372.078	1.532.888	1.785.596	2.092.655
2	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	132.218	163.701	191.055	224.980	288.079
3	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	353.967	392.788	515.381	657.625	800.083
4	Perubahan Stok	35.979	122.681	36.911	27.684	19.551
5	<i>Discrepancy</i> statistik	-46.995	-185.355	-87.673	-30.480	-22.863
6	Ekspor Barang/jasa	595.514	613.720	739.639	935.959	1.030.778
7	Impor barang/Jasa	480.815	465.940	632.376	816.405	870.090
	Produk Domestik Bruto	1.821.833	2.013.673	2.295.825	2.784.959	3.338.193

Sumber Data: BPS, Statistik Indonesia

Lampiran-2 PDB PENDEKATAN PRODUKSI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN (MILYAR RUPIAH)

JENIS PENGELUARAN		TAHUN				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	PERTANIAN,PETERNAKAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	281.590	305.783	329.124	363.928	430.493
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	160.921	167.572	205.252	308.339	354.626
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	523.199	568.920	644.342	771.724	936.361
4	LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	15.392	19.144	23.730	26.693	30.398
5	BANGUNAN	110.527	125.337	151.247	195.775	249.127
6	PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN	312.186	335.100	368.555	430.154	496.336
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	97.970	118.916	142.292	180.968	230.921
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA	154.442	174.074	194.410	230.587	271.543
9	JASA-JASA	165.602	198.825	236.870	276.789	338.385
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	1.821.829	2.013.671	2.295.822	2.784.957	3.338.190

Sumber Data: BPS, Statistik Indonesia

**Lampiran-3 PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU (MILYAR
 RUPIAH)**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	Produk Domestik Bruto	1.821.833	2.013.674	2.295.826	2.784.960	3.338.195
2	Pendapatan Neto thd Luar Negeri atas faktor Produksi	-54.513	-77.413	-105.350	-135.000	-144.200
3	Produk Nasional Bruto	1.767.320	1.936.261	2.190.476	2.649.960	3.193.995
4	Penyusutan (depresiasi)	-91.091	-100.683	-114.791	-139.248	-166.909
5	Produk Nasional Neto	1.676.229	1.835.578	2.075.685	2.510.712	3.027.086
6	Pajak Tidak Langsung Neto	-71.186	-85.272	-62.534	-53.719	-98.142
	Pendapatan Nasional	1.605.043	1.750.306	2.013.151	2.456.993	2.928.944

Sumber Data: BPS, Statistik Indonesia

**Lampiran-4 JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA DAN
KOMPOSISINYA (MILYAR RUPIAH)**

Akhir periode	Uang Kartal	Uang Giral	Jumlah	Komposisi (%)	
				Kartal	Giral
1993	14.431	22.374	36.805	39,21	60,79
1994	18.634	26.740	45.374	41,07	58,93
1995	20.807	31.870	52.677	39,50	60,50
1996	22.487	41.602	64.089	35,09	64,91
1997	28.424	49.919	78.343	36,28	63,72
1998	41.794	59.803	101.197	41,30	58,70
1999	58.353	66.280	124.633	46,82	53,18
2000	72.371	89.815	162.186	44,62	55,38
2001	76.342	101.389	177.731	42,95	57,05
2002	80.686	111.253	191.939	42,04	57,96
2003	94.542	129.257	223.799	42,24	57,76
2004	109.265	144.553	253.818	43,05	56,95
2005	124.316	157.589	281.905	44,10	55,90
2006	151.009	210.064	361.073	41,82	58,18

Sumber Data: BPS, Statistik Indonesia



Pusdiklatwas BPKP

Jln. Beringin II
Pandansari, Ciawi
Bogor 16720

ISBN 979-3873-18-3